



BIOGRAFI PENULIS

Suharno anak ragil dari lima bersaudara ini menamatkan pendidikan tinggi

- ✓ S1 UNSOED (2002)
- ✓ S2 UNDIP (2008)
- ✓ S3 Doktor Ilmu Ekonomi UNDIP (2018)

Penulis juga aktif melakukan penelitian pada keahliannya, yaitu :

- ❖ Analisis Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Perairan Cilacap
- ❖ Model Pemberdayaan Masyarakat Berdasar Perilaku, Kualitas Hidup dan Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir dan Pegunungan Jawa Tengah Selatan
- ❖ Upaya Peningkatan Produksi Gurami Banyumas Melalui Pendekatan Genetik, Reproduksi, Manajemen Pemeliharaan dan Evaluasi Aspek Sosioekonomi
- ❖ Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem (Studi Empiris di Pesisir Selatan Jawa Tengah Bagian Barat)
- ❖ Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dengan Pendekatan Agropolitan di Kabupaten Wonosobo

Pemilik *GRI Certified Training Program* ini, aktif mengikuti pertemuan nasional dan internasional, antara lain:

- *Annual Cairo Business Research Conference*, 2017
- *Training of Economics Valuation, Efficiency, and Stochastic Frontier using Nlogit Software*, FEP UPM Malaysia 2016
- *International Research Conference on Business and Economics*, 2016
- *Science Communication in Fisheries and Marine Sciences*, 2016
- Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers, 2015
- *2nd International Conference on Rural Development and Entrepreneurship*, 2013

Sederet hasil-hasil riset telah penulis tuangkan dalam jurnal internasional bereputasi dan terindeks **SCOPUS**. Kiprah ini telah memberikan penulis memiliki ID Scopus **57191189989** dengan **H-index Scopus 4** dan **H-indeks WOS 1**.

Beragam aktifitas yang penulis lakukan telah diganjar oleh institusi **Universitas Jenderal Soedirman** dengan torehan prestasi sebagai Dosen Teladan III & II di FEB UNSOED tahun 2011-2012. Penulis saat ini menjadi Koorprodi Magister Ilmu Ekonomi & Ketua Lab. Property FEB Unsoed, serta juga aktif dalam Konsultan penelitian dengan kepakaran *Resources & Regional Economics*. Buku ini semoga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Penulis dapat berbagi informasi melalui suharno@unsoed.ac.id.



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. UNSOED-Press
Jalan Prof. Dr. H.B. Boenyamin 708 Purwokerto
Kode Pos 53122 Kotak Pos 113
Telepon (0281) 626070
Email: unsoedpress@unsoed.ac.id



Monograf

MODEL SOSIAL DAN EKONOMI KELEMBAGAAN

Dr. E. Suharno, S.E., M.Si., dkk.



Dr. E. Suharno, S.E., M.Si.
Dr. E. Ary Yunanto, S.E., M.Si.
Dr. Agus Arifin, S.E., M.Sc.

Monograf

MODEL SOSIAL dan EKONOMI KELEMBAGAAN

MODEL SOSIAL DAN EKONOMI KELEMBAGAAN

Dr. E. Suharno, S.E., M.Si.
Dr. E. Ary Yunanto, S.E., M.Si.
Dr. Agus Arifin, S.E., M.Sc.



Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
2020

Monograf

MODEL SOSIAL DAN EKONOMI KELEMBAGAAN

© 2020 Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Kesatu, Desember 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Penulis:

Dr. E. Suharno, S.E., M.Si.
Dr. E. Ary Yunanto, S.E., M.Si.
Dr. Agus Arifin, S.E., M.Sc.

Editor Konten:

Arif Andri Wibowo, S.E., M.E.

Editor Bahasa:

Muh. Farid Al Farisy, S.E., M.Sc.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press)
Telp. (0281) 626070
Email: unsoedpress@unsoed.ac.id



Anggota

Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Nomor : 003.027.1.03.2018

vi + 83 hal., 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-6783-13-9

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, microfilm dan sebagainya.

PERSEMBAHAN

Untuk Lilis, Jay, dan Nay...

Teman yang selalu menginspirasi dan menyemangatiku...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya yang diberikan maka penulisan buku dengan judul ” Model Sosial & Ekonomi Kelembagaan” ini dapat terlaksanakan.

Bahan ajar Monograf ini merupakan cuplikan Model sosial dan Ekonomi kelembagaan. Dalam buku ini, dikembangkan potret Model sosial dan Ekonomi kelembagaan yang dihasilkan oleh penyusun.

Penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyelesaian bahan ajar ini, yaitu :

1. Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Cilacap yang telah membantu data dan penyusunan dalam melakukan FGD.
2. Segenap pimpinan dan staf lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Jenderal Soedirman atas segala bentuk dana dan dukungan yang diberikan.

Pada hakikatnya, pengembangan ilmu merupakan sebuah proses pembelajaran untuk terus berkembang dan berkelanjutan. Semua bantuan, dukungan dan pengorbanan yang penyusun terima dari semua pihak dalam menyelesaikan buku ini merupakan kebaikan yang tak ternilai besarnya dan sangat berharga bagi penyusun untuk terus maju dan berkarya. Penyusun belum dapat membalas semua kebaikan tersebut, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kita semua. Aamiin.

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Rumusan Masalah	9
BAB II APLIKASI MODEL SOSIAL DAN EKONOMI KELEMBAGAAN	11
2.1 Pemecahan Masalah	11
2.1.1 Definisi dan Indikator Kemiskinan	13
2.1.2 Hubungan antara Konsep Keberfungsian Sosial dengan Modal Sosial	18
2.1.3 Hubungan Antara Etnis dan Kapital Sosial	21
2.1.4 Kelembagaan	26
2.1.5 Kebijakan Publik dan Pengeluaran Pemerintah	36
2.1.6 Modal Sosial, Pemerataan Pendapatan, dan Kesejahteraan	41
2.1.7 Parameter dan Indikator Modal Sosial	51
2.2 Dukungan Teori Mutakhir	58
2.2.1 Parameter Modal sosial	58
2.2.2 Parameter Ekonomi	61
BAB III KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR INDEKS	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. <i>Development As Social Learning Hubungan Institutional (Public Police, Capital Social) Poverty</i>	26
2. Hubungan Kelembagaan Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan	56

BAB I.

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

1.1. Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia selama periode tahun 1980 an hingga tahun 1997, terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen dan peningkatan pendapatan perkapita. Namun peningkatan terjadi karena didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah terutama dibidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan ini berdampak terjadi perbaikan pada indikator-indikator sosial ekonomi (seperti meningkatnya anak yang bisa membaca dan menulis).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, namun hasilnya jauh dari memuaskan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara langsung dapat menyediakan lapangan kerja yang berkualitas (CIDES, 2007).

Revalion dan Datt (1996), menyarankan ukuran keberhasilan pembangunan bisa dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengeluaran riil perkapita setiap orang dewasa
2. Akses kepada barang yang tidak dipasarkan
3. Distribusi intra rumah tangga dan
4. Karakteristik personal

Pengeluaran riil merupakan indikasi yang lebih akurat dari kemampuan seseorang untuk memenuhi keperluannya. Akses kepada barang yang tidak dipasarkan perlu untuk mempresentasikan seberapa jauh fasilitas pelayanan publik tersebut dapat menjangkau masyarakat, baik berupa infrastruktur, sarana maupun prasarana untuk berbagai jenis kegiatan dan aktivitas pembangunan masyarakat (Fatah, 2006)

Ukuran keberhasilan pembangunan lain adalah dengan pendekatan pengentasan kemiskinan, yakni keberhasilan pembangunan diukur dengan seberapa jauh upaya-upaya pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan. Ukuran kemiskinan sendiri cukup bervariasi, namun pada umumnya semua landasan pada kerangka berpikir bahwa tingkat atau level tertentu yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk hidup layak, dan untuk dapat beraktivitas memperbaiki taraf hidupnya secara bebas dan mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain.

Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) di perlukan dalam upaya mengembalikan tugas-tugas negara untuk melindungi

kaum lemah . Dengan sistem negara kesejahteraan, negara bertugas melindungi golongan lemah dari gilaan mesin kapitalis (Suharto, 2002). Dengan kata lain menempatkan state sebagai pengaman sosial terhadap berbagai kegagalan mekanisme pasar bebas dan perlindungan terhadap korban persaingan pasar.

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam suatu negara seringkali dipandang hanya sebagai beban pertumbuhan ekonomi dan simbol intervensi negara. Pentingnya pembangunan kesejahteraan sosial adalah merupakan salah satu piranti keadilan sosial yang kongkrit, terencana serta pembelaan terhadap masyarakat kelas bawah. Tidak semua warga negara memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi living need. Negara wajib melindungi dan menjamin kelompok-kelompok rentan yang tersisih dari pembangunan. Negara perlu memberikan pelayanan sosial terhadap warganya sebagai bentuk tanggung jawab moral rakyat yang memilihnya.

Model pembangunan dengan orientasi kesejahteraan (welfare) lahir untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi belaka. Model ini memfokuskan diri kepada bagian penduduk miskin yang berada di negara-negara berkembang.

Pada dasarnya model ini merupakan suatu program kesejahteraan atau bantuan bagi orang yang sangat miskin melalui pemenuhan basic need , yang mencakup tidak hanya kesempatan memperoleh penghasilan akan tetapi juga akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum dan lainnya. Paradigma pembangunan ini berusaha memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dan tidak hanya mencoba memecahkan masalah kemiskinan melalui teori tetesan ke bawah (Trickle down Effect)

Teori pertumbuhan ekonomi sangat banyak mendapat kritik karena mengukur pembangunan hanya dari angka-angka Gross National product (GNP). Teori pertumbuhan sering menegaskan aspek pemerataan ekonomi .Karena itulah walau ada negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi sangat lemah pemerataannya.

Perdebatan ihwal negara kesejahteraan telah berlangsung lama (Alhumami, 2005), Secara sederhana negara kesejahteraan didefinisikan is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resource necessary to maintain a good standart of living.

Tujuan negara kesejahteraan, antara lain:

1. mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik

2. Menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata
3. Mengurangi kemiskinan
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people
6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga

Memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan diperlukan. Asumsi yang melatar belakangi konsep pertumbuhan ekonomi adalah dengan tingginya tingkat pertumbuhan maka akan segera didapat capaian pemerataan pendapatan. Artinya pembangunan ekonomi harus terlebih dahulu mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, baru kemudian pemerataan ekonomi akan tampak. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus atau linier dengan tingkat pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi disertai dengan tingginya angka kesenjangan pendapatan tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan untuk semua kelompok masyarakat (seperti tingkat kesehatan dan pendidikan). Yang penting adalah kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti memberikan layanan kesehatan, ketrampilan khususnya pada masyarakat miskin.

Menurut Usman, S dan Wanar, H. (2007) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung mampu mengurangi kemiskinan, karena melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dapat mengembangkan potensinya dan merubah peningkatan pendapatan secara berkesinambungan.

Indonesia termasuk negara yang menganut faham bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saat Pemerintahan Orde Baru, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai kira-kira 8 persen, angka kemiskinan masih relatif tinggi. Keadaan ini diperparah pada saat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, angka kemiskinan terus meningkat. Pada tahun 2002 wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Pasifik menyatakan kurang lebih 40 persen total penduduk miskin diantaranya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin ini didasarkan pada kriteria kemiskinan Internasional yang menetapkan garis kemiskinan bila pendapatan perkapita kurang dari US \$1.

Menurut CIDES (2007), pertumbuhan ekonomi diletakkan pada posisi puncak karena landasan filosofis dalam mengatasi kemiskinan harus ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang memadai lapangan kerja

tidak akan tersedia secara luas. Namun apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak sanggup menyediakan tatanan upah yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak dapat berperan dengan sendiri untuk menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan langsung menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Ada beberapa faktor yang menjadi catatan :

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu tidak menjamin akan menyelesaikan masalah kemiskinan.
3. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang industri canggih berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran
4. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi tidak sanggup mengatasi masalah kemiskinan

Dalam menanggulangi kemiskinan di daerah dapat dicapai bila lembaga formal (Pemerintah Daerah) memiliki kapasitas untuk:

1. Memberdayakan penduduk miskin
2. Mengembangkan kapasitas penduduk miskin dengan meningkatkan layanan dasar
3. Menyediakan kesempatan-kesempatan ekonomi
4. Menyediakan jaminan keamanan dari guncangan ekonomi
5. Menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan investasi dan usaha sehingga ekonomi daerah tumbuh pesat.

Penyebab tidak terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat miskin karena:

1. Tidak terjadi transfer daya kepada masyarakat miskin sebab program lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok warga mampu
2. Proses belajar sosial tidak terjadi sebab program lebih bernuansa ekonomi
3. Lembaga lokal masyarakat hanya berperan sebagai penyalur kredit dari pada lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pengurangan kemiskinan adalah kebijakan yang menyeluruh, tidak hanya dengan mengubah-ubah variabel makro (seperti pendapatan nasional), tetapi merupakan tantangan di banyak negara, karena kemiskinan dapat berakibat banyak masalah seperti dislokasi sosial, lingkungan yang stres, pengecualian etnis,

instabilitas politik dan menghambat pembangunan berkelanjutan (Piccioto, 1995).

Menurut World Bank (2000) kemiskinan merupakan suatu fenomena dan proses multidimensial. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dari ukuran kehidupan masyarakat saat ini miskin bukan saja kurang pendapatan. Tetapi karena minimnya kemudahan seperti tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan dan kemudahan lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin dalam kehidupannya tidak berdaya untuk mempengaruhi faktor sosial ekonomi sebagai penentu kesejahteraannya.

Indikator IPM (Indek Pembangunan Masyarakat) pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat hanya mengukur kesejahteraan masyarakat dari fisik saja, sementara indikator non fisik belum terukur. Untuk itu dirasa perlu untuk memasukkan variabel moral, partisipasi masyarakat dalam politik, indeks demokrasi, perlakuan gender dalam mengukur HDI masyarakat.

Yang tampak luput dari perhatian ahli ekonomi ketika merumuskan berbagai jenis modal adalah manusia sebagai aktor bertindak tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan, atas dasar kepentingan pribadi dan bersifat independen. Dalam kenyataannya, tindakan manusia, juga tindakan ekonomisnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Di luar modal fisik dan modal manusia yang juga berpengaruh terhadap perekonomian perorangan (individual), keluarga (house hold), dan suatu bangsa (nation) adalah modal sosial (Grooteart, 2001).

Bank Dunia (1998) memberi perhatian yang tinggi dengan mengkaji peranan dan implementasi modal sosial khususnya untuk mengentaskan kemiskinan. Paham yang dikembangkan oleh Bank Dunia dengan menggunakan dasar asumsi modal sosial sebagai berikut:

1. Modal sosial berada dalam seluruh keterkaitan ekonomi, sosial dan politik, meyakinkan bahwa hubungan sosial (relationship), mempengaruhi bagaimana pasar dan negara bekerja. Senaliknya, pasar dan negara juga akan membentuk bagaimana modal sosial di masyarakatnya.
2. Hubungan yang stabil antar aktor dapat mendorong keefektifan dan efisiensi baik perilaku kolektif maupun individual.
3. Modal sosial dalam satu masyarakat dapat diperkuat. Untuk itu dibutuhkan dukungan sumbe daya tertentu.
4. Agar tercipta hubungan-hubungan sosial dan kelembagaan yang baik maka anggota masyarakat harus mendukungnya.

Modal sosial tidak hanya sebagai jumlah dari seluruh institusi yang ada, tetapi modal sosial merupakan perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam modal sosial diperlukan adanya nilai “saling berbagi” (share value), serta pengorganisasian peran-peran (rules) yang diekspresikan dalam hubungan personal (personal relationships), kepercayaan (trust), dan common sense tentang tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat menjadi lebih dari sekedar kumpulan individu.

Dalam kaitannya dengan modal sosial, kualitas masyarakat perlu untuk mewujudkan kemampuan dan prestasi bersama. Hal ini mencakup ciri-ciri yang berhubungan dengan kelangsungan masyarakat itu sendiri. Kualitas masyarakat ditelaah atas beberapa kelompok sebagai berikut (Dahlan, 1993) :

1. Perihal kehidupan masyarakat yang dilihat dari keserasian sosial, kesetiakawanan sosial, disiplin sosial, dan kualitas komunikasi sosial.
2. Kehidupan sosial politik melalui level demokrasi, keterbukaan akses untuk partisipasi politik, kepemimpinan yang terbuka, ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi politik, serta keberadaan media massa.
3. Kehidupan kelompok.
4. Kualitas lembaga dan pranata kemasyarakatan dengan mempelajari kemandirian institusi dan kualitas, kualitas institusi menumbuhkan kemandirian masyarakat dan menjalankan fungsi yang baik, kualitas pemahaman hak dan kewajiban setiap orang, struktur institusi yang terbuka, dan mekanisme sumber-sumber yang potensial, dalam membangkitkan daya kemasyarakatan secara berkelanjutan

Kelemahan kaum miskin di pasar berasal dari keterisolasian wilayah atau pedesaan terpencil jauh dari pusat-pusat kegiatan. Pemberdayaan atau perubahan-perubahan lembaga lokal seperti koperasi asosiasi-asosiasi sangat krusial untuk mengurangi kemiskinan

Danielson (2001) dan Oktaviani (2003) Human Development indeks (Kesehatan dan Pendidikan) berpengaruh pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, sehingga dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan.

Pendidikan dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam kontituen modal manusia, namun ditetapkan yang memainkan peran penting dalam menentukan perluasan kemampuan manusia adalah meningkatnya kesehatan, berkurangnya kesuburan. Hal ini berguna membangun stok modal sosial yang akhirnya mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Indonesia melakukan investasi besar di bidang kesehatan, terfokus pada pembangunan fasilitas kesehatan publik, khususnya di pedesaan terpencil. Tahun 1992 jumlah kelahiran dengan tenaga medis dibanding dukun beranak 47,17 persen, tahun 2002 sebesar 68,4 persen. Pembangunan fasilitas kesehatan mengurangi tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan.

Kelahiran dengan bantuan tenaga medis dan pelayan kesehatan lebih berpengaruh terhadap kemiskinan dibanding dengan pengeluaran keluarga untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian pengeluaran Pemerintah di bidang sosial dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan pendapat Debray Ray (1998) bahwa modal sosial salah satu kekuatan masyarakat tradisional untuk mengurangi kemiskinan. Sementara menurut Putman (1993) modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokrasi. Schafft dan Brown (2002) mengatakan modal sosial adalah norma-norma jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama dapat diselenggarakan dengan mudah. Modal sosial merupakan kerjasama antara warga untuk menghasilkan tindakan kolektif.

Pilar modal sosial menurut Paldam (2000) adalah kepercayaan (trust), eksistensi jaringan (network) dan kemudahan bekerjasama (easi of cooperation).

Modal sosial negatif tumbuh subur karena kita memprioritasnya teori pertumbuhan. Menurut Walter Isard(1997), kebijakan ekonomi tidak akan efektif tanpa memasukkan faktor sosial dan budaya. Modal sosial positif dan gotong royong dapat dijadikan kosmetik ekonomi kebijakan Pemerintah. Padahal modal sosial positif justru membuka peluang pembangunan ekonomi (Kinsley, 1999)

Modal sosial dilahirkan dari bawah (bottom Up), tidak hierarkhi dan berdasarkan pada interaksi yang menguntungkan. Modal sosial bukan merupakan produk dari inisiatif dan kebijakan Pemerintah.

Menurut Narayan, Chamber, Shah, dan Petesch dan Narayan, Patel, Schafft, Rademacher dan Koch, Schulte (2000) Pendekatan pemberdayaan dimaksud untuk partisipasi aktif dari bawah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan di tingkat lokal. Ini memberi penekanan pada inducement peningkatan kinerja publik, swasta, penyediaan pelayanan publik dan kekuasaan negara untuk ditransformasikan pada penegakan aturan dan akuntabilitas (Wold Development Report, 2000/2001)

Pemberdayaan merupakan pendekatan terkonsentrasi pada peningkatan peran Pemerintah serta inovasi dan eksperimentasi oleh publik dan swasta, aktor untuk mengembangkan mekanisme kelembagaan pro kemiskinan

Pendekatan yang digunakan Indonesia saat ini dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah dengan pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan menjadi penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Sehingga orang miskin tidak hanya dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya kurang pangan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis dan obyek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia lebih banyak disebabkan oleh kemiskinan seperti; kekurangan bahan pangan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk dan lain-lain. Masalah ini memerlukan upaya Pemerintah, Masyarakat dan organisasi non Pemerintah untuk bekerja sama mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu perlu mengedepankan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaksanaannya dapat berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan proses pembangunan partisipatif ini, kesadaran kritis dan kemandirin masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga masyarakat bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya pengentasan kemiskinan.

Dengan adanya program Pemerintah PNPM Mandiri, terjadi perubahan pola kelembagaan dalam upaya dalam mengentasan kemiskinan di Indonesia, baik dari sisi institutional, organisation, dan pada para pelaku (aktor) yang terlibat didalam pengentasan kemiskinan

Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPB Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan selama ini sering terduplikasi antar proyek diharapkan dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu antara 5 sampai 6 tahun, maka PNPB Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah model sosial & ekonomi kelembagaan perikanan yang cocok untuk dapat mendukung pembangunan daerah pesisir?

BAB II. APLIKASI MODAL SOSIAL & EKONOMI KELEMBAGAAN

2.1. Pemecahan Masalah

Dasar persamaan untuk menggambarkan relasi hubungan antara pertumbuhan output aggregate dan kemiskinan dapat diketahui dari formulasi berikut ini:

$$\text{Log} \cdot G_{kt} = \alpha + \beta \text{Log} W_{kt} + \alpha_{kt} + \Sigma_{kt} \cdot \quad (1.1)$$

$$\lambda = \gamma + \beta\delta \quad (1.2)$$

Elastisitas ketidakmertaan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan adalah satuan komponen kunci dari perbedaan antara efek brutto (ketimpangan konstan) dan efek netto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan. Apabila elastisitas netto dan bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan pendapatan dinyatakan masing-masing γ dan λ . Elastisitas dari ketimpangan terhadap pertumbuhan dengan β , dan elastisitas dari kemiskinan dengan δ maka didapat persamaan (Wodon, 1999)

$$\lambda = \gamma + \beta\delta \quad (1.3)$$

Untuk mendapatkan elastisitas brutto dari kemiskinan terhadap ketimpangan (pertumbuhan sebagai variabel yang dikontrol digunakan persamaan

$$\text{Log} \cdot P_{kt} = W + \text{Log} W_{kt} + \text{Log} G_{kt} + W_k + V_{kt} \quad (1.4)$$

Dimana :

- P_{kt} = kemiskinan untuk wilayah k pada periode t
- W_{kt} dan G_{kt} = seperti persamaan (1.1)
- W_k = efek-efek yang tetap atau acak
- V_{kt} = teras kesalahan

Kakwani dan Pernia (2001) mendefenisikan indeks pertumbuhan pro kemiskinan yang sebenarnya terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tanpa mempengaruhi distribusi pendapatan disejumlah negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Memakai indeks ini, Kakwani dan Pernia menemukan bahwa selama periode tahun 1990-an. Pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan lebih Pro Kemiskinan dari pada pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Studi

dollar dan kraay (2000), Timmer (1997), menunjukkan hasil estimasi bahwa elastisitas pertumbuhan PDB dari pendapatan masyarakat miskin. (Dollar, Kraay, 2000).

Timmer (1997) menunjukkan hasil estimasi dengan memakai tehnik ekonometrik yang sama bahwa elastisitas tersebut hanya sekitar 8 persen, artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi.

Dari kerangka pemikiran teoritis studi dollar dan Kraay (2000) dan Timmer (1997) mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan out put dan kemiskinan adalah effect tricle down dari pertumbuhan ekonomi bentuk kesempatan kerja atau pengurangan upah/pendapatan kelompok miskin. Dengan asumsi ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi tricle down dari keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat efektif bagi pengurangan pengangguran.

Ukuran yang digunakan Bank Dunia adalah dengan cara mengelompokkan penduduk menjadi tiga (3) grup 40 % penduduk dengan pendapatan rendah, 20% penduduk dengan pendapatan menengah dan 40 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketidak merataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40 % penduduk dengan pendapatan rendah. Menurut kriteria Bank Dunia ketidak merataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40 % penduduk dari kelompok pendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12 % dari jumlah pendapatan.

Tingkat ketidak merataan sedang apabila kelompok tersebut menerima 12 % sampai 17 % dari jumlah pendapatan , sedang ketidak merataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17 % dari jumlah pendapatan.

Ada Tiga (3) indikator kemiskinan yang diperkenalkan Foster (1984) :

- I. The Incidence of poverty yaitu persentase dari populasi dengan pengeluaran konsumsi perkapita di bawah garis kemiskinan indeks ini disebut Rasio H.
- II. The Depth Of Poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan suatu wilayah di ukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK) atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut digunakan formula. :

$$P_a = (1/n) \sum_t (Z - Y_i) / Z)^a$$

Untuk semua $Y_t < Z$

Indek P_a ini sensitif terhadap distribusi jika $a > 1$ bagian $[(Z - Y_i) / Z]$ adalah perbedaan antara garis kemiskinan (Z) dan tingkat pendapatan, pendapatan dari kelompok ke i pendapatan (Y_i). Sedangkan bagi $[(Z - Y_i) / Z]^a$ Adalah persentase eksponen dari besarnya pendapatan yang dirugikan, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks P .

III. The Severity of Poverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK).

Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Tetapi selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dan garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini juga disebut distribusi onally sensitive indeks, dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Dengan dasar pemikiran tersebut muncul indeks kemiskinan Sen (1976) yang memasukkan dua faktor tersebut yakni koefisien gini.

$$S = H [(I + (1 - I) \text{ gini})]$$

Dimana I = jumlah rata-rata defisit pendapatan dari orang miskin sebagai suatu persentase dari garis kemiskinan dan koefisien gini mengukur ketimpangan antara orang miskin. Apabila salah satu faktor-faktor tersebut naik tingkat kemiskinan bertambah besar.

Munculnya indeks kemiskinan Sen (1976), karena dua indikator dari rasio H tidak bisa menjelaskan tingkat keparahan kemiskinan suatu negara, selain itu dua faktor lain yaitu rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin perlu diketahui.

2.1.1. Definisi dan Indikator Kemiskinan

Studi Kakwani dan Pernia (2001) di beberapa negara (seperti di Korea Selatan, Thailand) mendefinisikan indeks pertumbuhan yang pro kemiskinan. Yang membandingkan penurunan kemiskinan akibat pertumbuhan ekonomi. Selain itu studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di pedesaan lebih pro kemiskinan daripada diperkotaan.

Namun studi Deininger dan Squier (1995 a, b, 1996) dengan menggunakan data lintas negara tidak menemukan keterkaitan secara sistematis antara pertumbuhan ekonomi dan

kemiskinan, walaupun ada hubungan antara pertumbuhan PDB dan pengurangan tetapi secara positif. Selanjutnya studi Revallion dan Chen (1997) menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan selalu bersamaan dengan peningkatan pendapatan rata-rata perkapita atau standar hidup dan sebaliknya kemiskinan akan bertambah dengan adanya kontraksi ekonomi.

Dalam konteks Indonesia selama periode sebelum krisis tahun pro kemiskinan. Studi ini membandingkan penurunan kemiskinan terjadi akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan lebih pro kemiskinan daripada di perkotaan.

Dollar dan Kraay (2000) menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan dengan proporsi yang sama. Disisi lain Studi Timmer (1997) melaporkan pertumbuhan ekonomi memberi peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin kurang dari kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Dasar dari kerangka pemikiran studi-studi tersebut adalah bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebagai tricle-down effect, dimana pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan dari kelompok miskin. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat menjadi alat efektif bagi pengurangan kemiskinan, dengan asumsi ada yang dapat memfasilitasi. Namun peningkatan ini didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah terutama dibidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan ini berdampak jumlah anak tidak bisa membaca dan menulis berkurang, terjadi perbaikan pada indikator-indikator sosial ekonomi lainnya.

Kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep kemiskinan yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Sedangkan kemiskinan yang tidak mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan didalam distribusi pendapatan, yang dapat didefenisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata perkapita.

Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan dimana pendapatan berada dibawah keperluan minimum untuk dapat bertahan hidup tidak terpenuhi. Ini adalah ukuran tetap

didalam bentuk suatu keperluan kalori minimum ditambah komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup.

Indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia pada umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut.

BPS (2006) menggunakan batas garis kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi keperluan minimum makanan dan non makanan. Untuk keperluan makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran keperluan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Garis kemiskinan menurut BPS tahun 2006 apabila pengeluaran perkapita perbulan kurang dari Rp. 129, 108 penduduk tergolong miskin. Peranan komoditi pangan terhadap garis kemiskinan di Indonesia jauh lebih besar (74,99 Persen) dibanding peranan komoniti bukan makanan seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi garis kemiskinan semakin banyak jumlah penduduk yang tergolong miskin

Komponen yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan adalah biaya perumahan (listrik, angkutan, minyak tanah) di daerah perkotaan. Untuk daerah pedesaan peranan biaya perumahan terhadap garis kemiskinan hanya 2 persen.

BPS menggunakan dua pendekatan untuk mengukur kemiskinan yaitu pendekatan basic need (basic needs approach) dan pendekatan head account index. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi basic need. Sedangkan head account index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan relatif.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah minimum diperlukan untuk makanan dan bukan makanan. Dengan demikian garis kemiskinan terdiri dari dua (2) komponen yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (nonfood line).

Dengan menggunakan garis kemiskinan makanan food line tahun 2004 pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan Rp 126,456,- dan non makanan Rp 106,878,-, dengan total pengeluaran perkapita per bulan Rp 236,337 Tahun 2005 pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan Rp 143.672,- dan pengeluaran perkapita perbulan untuk non makanan Rp

123,079,-. Berdasarkan garis kemiskinan pengeluaran perkapita perbulan maka jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2004 sebanyak 24,8 persen di daerah pedesaan dan 11,3 persen di perkotaan, Tahun 2005 jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan sebanyak 22,7 persen dan di daerah perkotaan 12,4 persen. Data ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagian besar berada di pedesaan. Komoditi makanan memberi peranan yang besar terhadap kemiskinan

Menurut UNDP (1997) orang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. SUSENAS (2000) garis kemiskinan di Indonesia dilihat dari pengeluaran untuk keperluan pangan dan non pangan. Keperluan pangan terdiri dari komoditi yang wajib dikonsumsi untuk mencapai tingkat hidup layak. Kelompok keperluan bukan pangan terdiri dari sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan.

Ada beberapa permasalahan kemiskinan yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah kegagalan dalam memenuhi keperluan dasar yang terdiri dari:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
5. Terbatasnya akses layanan perumahan
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi
7. Lemahnya kapasitas kepemilikan dan penguasaan tanah
8. Memburuknya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
9. Lemahnya jaminan rasa aman
10. Lemahnya partisipasi
11. Lemahnya penanganan masalah kependudukan
12. Lemahnya kesetaraan gender
13. Kesenjangan antar wilayah

Biro Pusat Statistisk (BPS, 2005) menggunakan beberapa k kriteria untuk mengukur kemiskinan diantaranya yaitu jenis lantai bangunan rumah, jenis bahan baku untuk makan sehari-hari, penghasilan, frekwensi makan setiap hari, kepemilikan televisi, motor, ternak dan tabungan. Sementara menurut BKKBN seorang bisa dikatagorikan prasejahtera antara lain makan kurang dari dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk bekerja/sekolah dan bepergian, sebagian besar

lantai rumah berupa tanah, kurang dari sekali dalam satu minggu makan daging/ikan/telur, atau dalam setahun seluruh anggota keluarga hanya membeli satu stel pakaian baru.

Dari beberapa kriteria diatas dapat diketahui indikator kemiskinan pada satu rumah tangga miskin memiliki ciri-ciri:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbai kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air/tidak terlindungi/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam semniggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber pendapatan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,50 Hektar, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya.

SUSENAS (2001), Profil masyarakat miskin terlihat dalam butir-butir berikut ini:

1. Rumah tangga cenderung memiliki ukuran keluarga besar
2. Tingkat pendidikan masyarakat rendah, proporsi pendidikan diantara perempuan relatif rendah dibanding laki-laki
3. Kelahiran masyarakat masih tradisional atau tidak dihadiri petugas kesehatan
5. Kepala rumah tangga bekerja disektor informal dan bekerja disektor pertanian
6. Jam kerja sangat singkat
7. Memiliki pendidikan dasar atau kurang
8. Tingkat kematian bayi tinggi
9. Akses ke air minum mahal
10. Fasilitas kesehatan kurang

Pengkajian kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa alasan :

1. Konsep kemiskinan didominasi oleh perspektif tunggal, yakni kemiskinan pendapatan atau *income poverty* (Chambers, 1997). Pendekatan ini dikritik oleh para ahli ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang dapat mencerminkan keadaan kemiskinan secara lengkap. Dimana kemiskinan hanya masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi keperluan hidupnya
2. Angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi baik secara absolut maupun relatif. Masalah kemiskinan merupakan isu sentral karena bukan saja dari jumlahnya yang meningkat, melainkan dimensinya semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kualitas hidup
3. Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effect*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi merupakan muara masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu konsep keberfungsian sosial khususnya modal sosial perlu digali untuk mendekati dan mengukur kemiskinan.

2.1.2. Hubungan antara Konsep Keberfungsian Sosial dengan Modal Sosial

Konsep keberfungsian sosial merupakan harta terpendam, yang dapat digali untuk mendekati dan mengukur kemiskinan. Beberapa dekade pendekatan mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma Neo Liberalis yang dimotori Bank Dunia dan didasari teori Modernisasi yang sangat mengagungkan pertumbuhan ekonomi. Menurut pendekatan teori modernisasi pengukuran kemiskinan dipengaruhi oleh perspektif *income poverty*, yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator garis kemiskinan. GNP juga memiliki dimensi tunggal dan karenanya gagal menangkap aspek budaya, sosial, politik dan pilihan-pilihan yang dilakukan manusia (Haq, 1995, 4 b).

Ada tiga (3) kelemahan pendekatan *Income Poverty* dalam mengkaji masalah kemiskinan (Satterthwaite, 1997)

1. Kurang memberi perhatian pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk kesengsaraan orang miskin.

2. Tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskin dalam menghadapi kemiskinan.
3. Tidak menerangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan

Hal ini dikarenakan pendekatan GNP dan Income Poverty memiliki kelemahan dalam memotret kemiskinan

Tahun 1990-an UNDP dibawah kepemimpinan Hahub Ulhaq memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index). Pendekatan ini relatif lebih komprehensif karena mencakup faktor ekonomi, sosial, budaya masyarakat miskin. Pendekatan ini memadukan pendekatan Model Keperluan Dasar (Basic Need Model) yang digagas oleh Poul Streeten dan Konsep Kapabiliti (capability) yang dikembangkan Sen (1998).

Adanya kelemahan paradigma kemiskinan dimana pengukuran dan indikator yang digunakan terfokus pada kondisi dan keadaan kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi dominan. Akibatnya aspek aktor dan pelaku kemiskinan serta sebab akibat yang mempengaruhi belum tersentuh secara memadai. Selain ini metodenya masih berpijak pada outcome indikator sehingga belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Orang miskin belum dipandang sebagai manusia (human being) yang memiliki sesuatu, yang dapat digunakan baik dalam mengidentifikasi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukannya sendiri.

Kelemahan paradigma lama menuntut perubahan pada fokus pengkajian pada pengukuran kemiskinan khususnya menyangkut kerangka kosepsional dan metodologi pengukuran kemiskinan.

Paradigma demokrasi sosial dapat dijadikan dasar dalam merumuskan konsep keberfungsian sosial sebagai paradigma baru.

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi keperluannya. Konsep ini menunjukkan kapabilitas (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran sosial dilingkungannya.

Baker, Dubois, dan Miley (1992) menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkait dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi keperluan dirinya dan keluarganya, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Menurut

konsep ini manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Manusia mempunyai kemampuan dan potensi yang dikembangkan dalam proses pertolongan. Manusia memiliki atau dapat menjangkau, memanfaatkan dan memobilisasi aset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya.

Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistik dan komprehensif yang dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan permasalahan sosial ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinan. Pendekatan yang memandang orang miskin memiliki seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang seiring digunakan dalam mengatasi berbagai masalah seputar kemiskinannya.

Beberapa pendekatan keberfungsian sosial dalam studi kemiskinan yaitu :

1. Kemiskinan sebaiknya tidak dilihat hanya dari karakteristik orang miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis dalam merespon kemiskinannya termasuk efektifitas jaringan sosial (lembaga masyarakat program-program anti kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosialnya.
2. Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal melainkan indikator komposit untuk analisis keluarga atau rumah tangga dan jaringan sosial (Social net work) yang ada disekitarnya.
3. Konsep kemampuan sosial (social capabilities) dipandang lebih lengkap dari konsep pendapatan (income) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.

Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa indikator yang mencakup kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian (line hood capabilities), memenuhi keperluan dasar (basic need fulfilment), mengelola aset (asset manajemen), menjangkau sumber-sumber (acces to resources), berpartisipasi dalam kegiatan (access to social capital) serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (cope with shocks and stress).

Indikator kunci untuk mengukur keberhasilan jaringan sosial dapat mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial memperoleh sumber daya (sumber daya manusia dan financial), menjalankan perannya atau fungsinya mengelola aset,

menjangkau sumber-sumber, partisipasi dalam program anti kemiskinan.

Kebijakan publik termasuk didalamnya kebijakan sosial dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam membangun dan meningkatkan modal sosial. Pemerintah dapat menciptakan kondisi dimana modal sosial suatu komunitas (masyarakat) dapat dikembangkan atau sebalik.

Modal sosial faktor penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan. Elemen modal sosial modal sosial kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme seperti meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya persepsi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunkan tingkat kekerasan dan kejahatan (Blakeley dan Suggate, 1997, Suharto, 2005 a, Suharto, 2005 b).

Perlunya tindakan Pemerintah agar masyarakat miskin memiliki akses (layanan dasar, infrastruktur dan asset). Kebijakan memfasilitasi pemberdayaan dengan pemilihan dan implementasi kebijakan publik yang responsif terhadap keperluan penduduk miskin, dimana hal ini tergantung interaktif politik, sosial dan proses institusi lainnya (lembaga-lembaga sosial, akses pasar).

Pencapaian akses tanggung jawab dan memperhitungkan masyarakat miskin adalah memerlukan kekuatan, cara dan kerjasama dikalangan orang miskin, kelas menengah, dan kelompok masyarakat lainnya yang ada dalam masyarakat, kerja sama aktif antara berbagai pihak adalah pilihan kebijakan pemerintah yang dapat membantu masyarakat miskin. Lembaga hukum dan pelayanan publik yang efisien dan terpercaya untuk semua masyarakat memperkuat partisipasi masyarakat miskin untuk turut partisipasi politik di tingkat lokal dan proses pengambilan keputusan. Hal yang juga sangat penting menghilangkan / meniadakan hambatan-hambatan sosial dan kelembagaan seperti, pembatasan jenis kelamin, entis dan status sosial.

2.1.3. Hubungan Antara Etnis dan Kapital Sosial

Identitas budaya Indonesia sangat beragam, bagaimana eksistensi masyarakat Indonesia yang mempunyai bermacam etnis, tradisi, wilayah budaya yang berbeda. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat. 1983)

Ada wilayah budaya masyarakat etnis Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Batak, Bali, Banjar, Bugis, Melayu dan lain-lain. Dengan bahasa dan perangkat sistem nilai budaya yang berlainan, masing-masing suku-suku bangsa berupaya menjaga identitas etnis mereka, sehingga dalam jangka panjang eksistensi mereka sebagai suatu masyarakat etnis tetap berlangsung. Sistem budaya merupakan nilai-nilai budaya yang merupakan konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupannya.

Koentjaraningrat (1993) menggolongkan keberanekaragaman Etnis di Indonesia ke dalam tiga (3) golongan yaitu suku bangsa, golongan minoritas, dan golongan masyarakat terasing. Tiap-tiap Etnis memiliki tradisi dan sistem budaya berbeda yang ditentukan oleh bagaimana cara pandang masyarakat terhadap alam (kosmos) dan bagaimana mereka menempatkan diri mereka dalam tatanan alam.

Mochtar Naim (dalam Esten, 1999) melihat ada dua(2) pola sistem budaya Nusantara yakni disebut Pola J (Pola Jawa) dan Pola M (Pola Minangkabau).

Etnis yang memiliki pola J mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hirarkhis, feodalisme, dan paternalistik
2. Orientasi budaya ke keraton sebagai pusat kekuasaan
3. Kepatuhan dan anti penyimpangan merupakan sikap dasar dari setiap warga.
4. Masyarakat cenderung sinkretis dan sekuler.

Etnis yang memiliki pola M mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

1. Masyarakat tribal dan bersuku-suku
2. Demokrasi, egaliter
3. Desentralisasi
4. Kekuasaan ada di nagari (republik kecil didesa)
5. Kekuasaan dibagi secara fungsional : ninik mamak mengutus adat, alim ulama mengurus agama, cerdik pandai mengurus masalah duniawi, dan mantil/ dubalang mengurus keamanan nagari

Berdasarkan sifatnya yang hirarkhi, paternalistik dan feodalisme maka keselarasan bagi orang Jawa terletak dalam perbedaan tempat seseorang didalam masyarakat, Dimana ada tua ada muda, ada tinggi ada rendah, ada raja ada rakyat. Masing-masing selalu ada ditempatnya.

Melakukan tradisi berkomunikasi atau berbahasa yang bertingkat tingkat, tradisi dalam berkesenian, tradisi dalam tata krama dan lain-lain sebagai perwujudan konsep dan sistem budaya masing-masing etnis.

Kekuatan modal sosial pada masyarakat pesisir berupa norma, aturan atau nilai yang didasari oleh adat istiadat dan ajaran agama hindu. Dengan dasar inilah ikatan sosial antar warga terbentuk sebagai perwujudannya adalah masyarakat pesisir mempunyai hubungan kekerabatan (social network) yang erat dan kuat.

Norma merupakan aturan-aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan perumusannya biasanya bersifat sangat terperinci, jelas, tegas dan tidak meragukan. Norma khusus dapat digolongkan menurut pranata-pranata/Institution masyarakat yang ada misalnya pranata ekonomi, pranata keagamaan, pranata peradilan dan lain-lain (Koentjoroningrat, 1993)

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia banyak melakukan tindakan interaksi antar individu. Diantara semua tindakan masyarakat punya pola yang berbeda. Ada tindakan-tindakan dengan pola resmi dan pola tidak resmi. Sistem-sistem yang menjadi wahana memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi disebut pranata. Jadi pengertian pranata adalah sistem atau norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas tersebut adalah lembaga atau institusi. Badan atau lembaga merupakan bentuk kelompok atau perkumpulan khusus.

Adat (Koentjoroningrat, 2000) adalah wujud ideal kebudayaan. Ada empat (4) tingkat adat:

1. Nilai budaya
2. Norma-norma
3. Aturan khusus

Institusi adat berkait dengan norma karena adanya peranan dalam masyarakat. Terdapat beberapa hal yang terkandung di dalamnya yaitu:

- Kepemimpinan lokal dengan sistem kekuasaan yang melekat padanya

- Menempatkan pemimpin lokal pada ranah moral spritual menyebabkan institusi lokal itu masih hidup di komunitasnya.

Kepemimpinan dalam Institusi adat tidak hanya mempertahankan kepercayaan (trust) orang banyak, tetapi memperkuat rasa percaya diri Institusi tersebut.

Di dalam masyarakat terdapat hukum adat (Social Inatitution) yang merupakan alat untuk mengatur perilaku kehidupan anggotanya. Hukum adat merupakan suatu aktivitas pengawasan sosial.

Mekanisme hukum adat:

1. Yang diberi kuasa dan pengaruhnya dalam masyarakat (kelompok sosial) untuk memberi keputusan-keputusan terhadap masalah sosial
2. Keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dimaksud sebagai keputusan-keputusan yang berjangka panjang dan dianggap juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa di masa yang akan datang
3. Keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung perumusan, kewajiban dan hak pada pihak yang bersangkutan.
4. Keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikaitkan dengan sangsi-sangsi dalam arti seluas-luasnya.

Kelompok sosial (masyarakat khusus) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu dan bersifat kontinue dan terikat oleh suatu rasa identitas tertentu (bersama). Unsur kesatuan hidup (unsur Grouping) terbentuk karena adat istiadat dan unsur kontinuitas. Umumnya kelompok sosial mempunyai pemimpin kelompok berlandaskan kewibawaan dan kharismatik, dimana hubungan (relasi) dengan warga kelompok yang dipimpinnya lebih berdasarkan hubungan perorangan.

Seringkali ahli ekonomi ketika dirumuskan berbagai jenis modal adalah manusia sebagai aktor bertindak bertindak semata-mata digerakkan oleh tujuan atas dasar kepentingan pribadi dan bersifat independen. Dalam kenyatannya tindakan manusia juga tindakan ekonomisnya dipengaruhi oleh lingkungannya (Saroyo, 2007)

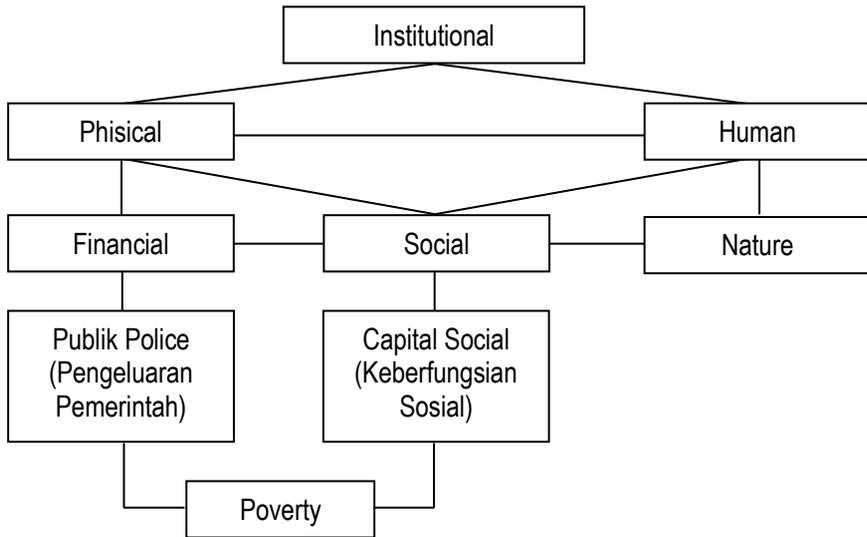
Di luar modal fisik dan modal manusia nyata modal sosial juga berpengaruh terhadap perekonomian perorangan (individual), keluarga (house hold), dan suatu bangsa (nation) (Grootart, 2001).

Modal sosial menurut Christiaan Grootaert dan Thierry Van Besteler didefinisikan sebagai Institutional, Relation Ship, Attitude and Value that govern (memerintah, menguasai) interaction among people and contribute to economic and social development (Christiaan Grootaert and Thierry van Bestelear (eds),2002). Sementara bagi Putman modal sosial memiliki tiga bentuk yakni kepercayaan (trust), norma (norm), dan jejaring (Network) (Huang, 2003).

Menurut Tonkiss (2000), modal sosial baru bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. Kenyataannya jaringan sosial (social network) tidaklah begitu saja menciptakan modal fisik dan modal financial yang belum pernah ada. Dalam hal ini menurut Wilson, dalam kasus Amerika bahwa banyak daerah dan penduduk miskin memiliki pertalian yang kuat (jejaring sosial) namun terisolasi dari jaringan ekonomi dan sosial yang didominasi mainstream (Brata, 2004).

Perhatian terhadap modal sosial makin diarahkan pada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang sifatnya lokal termasuk dalam hal ini pengurangan terhadap kemiskinan. Karena hal ini akan lebih mudah untuk dicapai dan biayanya kecil jika modal sosial yang besar (Narayan dan Pritchett, 1997, Grootaert dan Bastelaer.2001, Brata, 2004)

Bourdieu (2005) menegaskan modal sosial nilainya tidak kalah penting secara ekonomis dengan modal ekonomi. Dengan modal sosial yang tinggi (baik) akan menumbuhkan partisipasi lokal (masyarakat) dalam pembangunan.



Gambar 1. *Development As Social Learning Hubungan Institutional (Public Police, Capital Social) Poverty*

2.1.4. Kelembagaan

Dalam kasus Indonesia disebutkan oleh Human Capital Development Report (2004) perkembangan pembangunan manusia tahun 1970 an sampai tahun 1990 an tergantung pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Sementara ini pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan relatif sedikit dibanding Malaysia, Thailand dan Philipina

Selama periode krisis capaian pembangunan manusia mengalami kemerosotan, juga membawa pengaruh terhadap terhadap kemiskinan (Boot, 1999, Fane 2000). Pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia berpengaruh sangat penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya yaitu tenaga kerja.

Format anggaran pemerintah di Indonesia, pengeluaran pemerintah mencakup sektor pendidikan dan kebudayaan sosial, pemuda dan olah raga, agama serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang kesehatan mencakup sektor tenaga kerja, kependudukan dan keluarga sejahtera serta kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja (Lewis dan Chakeri , 2004).

Lanjouw, Pradhani, Saadah, Sayed dan Sparrow (2001) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah (dalam bidang pendidikan, kesehatan) terhadap tingkat pembangunan manusia dan hubungan antara pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan.

Indek pembangunan manusia terdiri dari indeks komposit dari harapan hidup. Melek huruf dewasa, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Dalam pembangunan manusia (IPM) tingkat melek huruf merupakan salah satu komponen indeks kemiskinan manusia.

Piccioto (2000), untuk mencapai tujuan pembangunan memerlukan tindakan memacu pertumbuhan. Namun yang terjadi adalah ketidak merataan pendapatan. Bahkan pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mencapai tujuan kesehatan dan pendidikan, tingkat kematian bayi dan anak, dengan 2/3 anak putus sekolah, penyebaran HIV/AIDS.

Meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk meningkatkan sistem kesehatan (layanan kesehatan), ketrampilan, kesempatan kerja adalah penting dengan memperbaharui pola atau kualitas pertumbuhan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi kelembagaan dan kondisi struktural, dimana penciptaan peluang baru dan mengurangi kerugian bagi masyarakat miskin.

Dalam masyarakat dimana terjadi ketidakmerataan, keadilan mempunyai peran penting dalam mengurangi kemiskinan

Menurut Cides (2007) pertumbuhan ekonomi tinggi tidak dapat berperan dengan sendirinya menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan langsung menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Untuk menanggulangi kemiskinan di daerah dapat dicapai bila lembaga formal (Pemerintah Daerah) memiliki kapasitas untuk:

1. Memberdayakan penduduk miskin
2. Mengembangkan kapasitas penduduk miskin dengan meningkatkan layanan dasar.
3. Menyediakan kesempatan-kesempatan ekonomi
4. Menyediakan jaminan keamanan dari goncangan ekonomi
5. Menyediakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan investasi dan usaha sehingga ekonomi daerah tumbuh pesat.

Proses tidak terjadinya pemberdayaan bagi masyarakat miskin karena:

1. Tidak terjadinya transfer daya kepada masyarakat miskin sebab program lebih bernuansa ekonomi
2. Lembaga lokal masyarakat hanya berperan sebagai penyalur kredit dari pada lembaga pemberdayaan masyarakat.

Istilah pemberdayaan pertama kali digunakan oleh aktivis gerakan Black Panther dalam mobilisasi politik di USA pada tahun 1960-an. Konsep pemberdayaan pertengahan tahun 1980-an dipopulerkan oleh gerakan Kaum wanita. Saat ini konsep pemberdayaan masuk keberbagai disiplin ilmu, baik dalam tatanan teori maupun praktek. (Aithai Vathsala, 2005).

Kata pemberdayaan (empower) sinonim dengan memberi daya atau kekuasaan kepada. Ada dua (2) citra pemberdayaan yaitu:

Memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe ini disebut pemberdayaan (empowerment). Kekuasaan didapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Tipe ini disebut Self empowerment.

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Korten (1983) menjelaskan bahwa gerakan pemberdayaan diawali dari munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat), yang diakui sebagai "Pembangunan Alternatif". Menyebutkan ciri-ciri paradigma pembangunan berpusat pada rakyat sebagai berikut;

1. Logika yang dominan dari paradigma ini adalah logika mengenai ekologi manusia yang seimbang
2. Sumber daya utama berupa sumber-sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tidak habis-habisnya
3. Tujuan utama adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi manusia.

Paradima pemberdayaan ini memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai "aktor" yang menetapkan tujuan mengendalikan sumberdayaan dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Konsekwensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusia dan komunitas-

komunitas yang mandiri. Model pembangunan ini punya perbedaan fundamental didalam karakteristik dasarnya dibanding dengan strategi pertumbuhan atau strategi kebutuhan dasar yang selama ini mendominasi agenda pembangunan di Dunia ke Tiga, termasuk Indonesia.

Suharto (2004) menyatakan secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “Power” (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain. Terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan berkait dengan pengaruh dan kontrol

Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Unsur pokok kepatuhan interaksi antar manusia maupun antar kelompok didasari rasa takut, rasa cinta, dan kepercayaan akan bertindak dan berlaku baik. Kekuasaan dapat berasal dari tradisi dan sistem kepercayaan pada nilai-nilai yang dianut. Karena itu, kekuasaan dan hubungannya dengan kekuasaan bisa berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain kemungkinan terjadi proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua (2) hal:

1. Kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Berdasarkan penjelasan berbagai teori diatas, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya membantu masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri atau upaya untuk memimpin diri sendiri, sehingga masyarakat dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dilaksanakan tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukung seperti PNPM Generasi: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar pengembangan

pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk Pengembangan Daerah Tertinggal, pasca bencana dan konflik.

Tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sector dan Pemerintah Daerah.

Sekretariat TIM Pengendali PNPM Mandiri menjelaskan PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan dana pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan umum program adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
3. Pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya pengurangan kemiskinan.
5. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestirikan kearifan lokal

7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan kelembagaan dalam ekonomi, salah satu dipelopori oleh Douglass C. North dalam bukunya "Institution, Institutional Change and Economy Performance" membedakan Institusi, Organisasi, dan Aktor Ekonomi dalam membahas perubahan kelembagaan dalam ekonomi.

Institusi merupakan konteks (landasan) dimana organisasi bekerja, menyangkut aturan yang tampak (hukum) dan mengakar (norma). Dalam organisasi para aktor ekonomi (pelaku) berinteraksi dibatasi oleh aturan hukum dan norma. Interaksi antara ketiganya (institusi, organisasi dan aktor ekonomi akan menentukan kualitas kinerja ekonomi (Douglass, 1990)

Lembaga adalah struktur interaksi antar manusia untuk menentukan keperluan (intensif) bersama (biaya, teknologi) untuk menentukan pilihan yang membuat individu membentuk masyarakat dan kinerja dari waktu ke waktu.

Lembaga terdiri dari aturan formal, informal, kendala (norma dari perilaku, konvensi, dan menentukan aturan aturan (mengatur) perilaku dan menegakkan keduanya. Lembaga merupakan aturan main, organisasi adalah pemain.

Pada keadaan kelompok tertentu tujuan dari kelembagaan, kendala dan pilihan individu dalam membuat kelembagaan tergantung dari penegakan atau efektivitas pelaksanaan/ aturannya. Penegakan dilakukan oleh pihak pertama (memaksa diri mengatur perilaku).

Oleh pihak kedua pembalasan/dan atau oleh pihak ketiga (masyarakat) memberi sanksi atau paksaan penegakan oleh negara. Lembaga mempengaruhi kinerja ekonomi dengan menentukan bersama teknologi (cara-cara yang dipakai) bertransaksi dan transformasi (biaya produksi).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, merupakan program Nasional dalam rangka mewujudkan kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan simultan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penganggulangan kemiskinan berkelanjutan.

Tujuan umum dari program ini adalah meningkatkan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabilitas
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menaggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya penggulangan kemiskinan Pemerintah memiliki keterbatasan baik dari segi organisasi, manajemen teknis dan operasional, serta keuangan/pendanaan. Melalui KEPRES No.124 Tahun 2001 jo. No.8 Tahun 2002 Pemerintah membentuk komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang secara khusus menyelenggarakan upaya penggulangan kemiskinan di Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholders pada semua tingkatan (Pemerintah, swasta, LSM, dan Kelompok Masyarakat).

Investasi Pemerintah di sektor publik untuk bidang sosial mempunyai dua (2) manfaat:

1. Pengeluaran Pemerintah dibidang sosial dimana komponen utamanya adalah pengeluaran dibidang pendidikan dan kesehatan, bermanfaat untuk untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi disektor publik dapat

meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan

2. Distribusi pendapatan dan investasi swasta secara umum ditemukan berpengaruh kuat terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan.

Upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah di banyak negara Dunia ke tiga pada umumnya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Oleh karena itu upaya penanganan kemiskinan tidak menyelesaikan masalah.

Piccियो (1995) menganggap pentingnya pendekatan ekonomi kelembagaan dalam menganalisa efek dari pembangunan terhadap pengurangan kemiskinan.

Williamson (2000), membagi klasifikasi kelembagaan dalam lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro berkaitan dengan aturan dari perilaku manusia, tipu daya, kendala, struktur politik, ekonomi, interaksi sosial informal, kaidah-kaidah, sanksi-sanksi, larangan, kebiasaan, tradisi, macam perilaku, dan aturan-aturan resmi.

Konstitusional, Undang-Undang, hak milik menurut (Utara, 1991), termasuk lingkungan mikro. Dimana pada tingkat mikro berurusan dengan lembaga pemerintah, stok pasar, hirarki dan jenis kontraktor, pengelola transaksi, lembaga lokal informal.

Gandhi (1998) membuat survey yang terkait Institusi pembangunan pertanian di India. Rumah tangga biasanya ada dalam kelembagaan lokal dan berinteraksi dengan lingkungan secara dinamis dibawah pengaruh struktur sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa lembaga biasanya menguntungkan masyarakat miskin, sedang lembaga yang lain bisa merugikan atau bersifat diskriminatif terhadap masyarakat miskin. Kekuatan yang melandasi lembaga-lembaga (ekonomi, sosial Keberhasilan tindakan kolektif masyarakat untuk mendapatkan akses sumberdaya dan memperoleh pendapatan umumnya tergantung tidak hanya dari rumah tangga untuk mendapatkan sumberdaya tersebut, tetapi pada kelembagaan lokal dilingkungannya. dan politik) adalah satu-satunya faktor non pendapatan yang paling mungkin berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan (Ahsan, 2001)

Kerangka analisa kelembagaan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia diukur dengan dua (2) komponen kelembagaan yaitu

1. Modal sosial diukur dengan sejumlah indikator yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), ketersediaan kredit mikro, suara masyarakat yang tertampung pada isu-isu lembaga publik dan politik. Dalam komponen modal sosial terkandung didalamnya kerjasama-kerjasama atau kemitraan yang diwakili kelompok komunitas/masyarakat lokal formal, koperasi-koperasi pedesaan (KUD), asosiasi-asosiasi petani, skim-skim yang bersifat menolong diri sendiri
2. Komponen pengeluaran Pemerintah diukur dengan indikator tingkat kesehatan, pendidikan, jumlah dan kondisi infra struktur fisik. Tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan dua (2) sumber utama Human Development Indeks (HDI).

Human Development Index (HDI) adalah satuan yang dikembangkan oleh UNDP guna mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. HDI angka yang diolah berdasarkan tiga (3) dimensi yaitu panjang usia (longevity), pengetahuan (Knowledge), dan standar hidup (Standart of living) suatu bangsa.

Secara teknis ke tiga dimensi dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu kesehatan (dan kependudukan), pendidikan serta ekonomi. Selama ini, seringkali hanya pendapatan yang jadi tolak ukur kesejahteraan atau kemajuan pembangunan suatu bangsa. HDI menggabungkan ukuran-ukuran harapan hidup, pendidikan, literasi dan pendapatan untuk melihat pembangunan suatu negara secara lebih luas.

Indek pembangunan manusia (HDI) yaitu suatu indeks komposit merupakan salah satu indikator pengukuran yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia satu negara. HDI disusun dari tiga (3) indikator yaitu:

1. Lama hidup (UHH) diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir
2. Pendidikan diukur dengan rata-rata jumlah yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani. Angka melek huruf yaitu persentase penduduk yang berusia 15 ketaas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin dan lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas atau lebih.
3. Diukur dengan pengeluaran konsumsi perkapita perbulan.

HDI merupakan rata-rata sederhana dari tiga komponen diatas.

Selama ini banyak studi yang hanya menganalisa tentang hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan (Balisacan, Pernia, dan Asra, Timmer 2000).

Pada saat terjadi krisis capaian pembangunan manusia mengalami penurunan dan juga membawa pengaruh buruk terhadap tingkat kemiskinan (Boot 199, Fane, 2000). Selain itu pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini karena kualitas pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Menurut Survey Political and Economic Risk Consultant (PERC) kualitas pendidikan Indonesia tahun 2007 berada di urutan ke 12 dari 12 negara di Asia Atau berada dibawah Vietnam. Hasil survey World Competttiveness Yeard Book daya saing pendidikan Indonesia berada di urutan ke 53 dari 55 negara. Dampak dari rendahnya mutu pendidikan menyebabkan rendahnya HDI.

Laporan UNDP tahun 2007 indeks HDI Indonesia adalah 0,728 berada di urutan ke 107 dari 177 negara dan urutan ke 9 dari negara Asean.

Masalah dibanyak negara berkembang HDI juga dipengaruhi oleh masalah kesehatan. Hal ini bukan disebabkan karena tidak adanya pelayanan kesehatan tetapi ketidak mampuan dari sisitem pelayanan kesehatan publik untuk memberikan pelayanan berkualitas baik disemua wilayah. Kesehatan dan nutrisi yang buruk dapat mengganggu produktivitas individu maupun nasional dan dapat mempengaruhi masa hidup dari kelompok miskin. Kesenjangan dalam menikmati fasilitas publik untuk semua warga negara dapat menghambat kesempatan-kesempatan mendapat suatu kehidupan yang sehat.

Pengalaman beberapa negara terdapat kesenjangan memanfaatkan fasilitas publik. Seperti tingkat etnis minoritas dalam memanfaatkan pelayanan publik misalnya fasilitas kesehatan. Tahun 1990 an di beberapa negara di Afrika terdapat kesenjangan tingkat kematian bayi antar entis. Amerika latin kelompok pribumi memiliki kurang dari tiga perempat anak sekolah dibanding kelompok non pribumi dan perempuan lebih dirugikan dibanding laki-laki (World Bank, 2005).

Di Asia Selatan perempuan hanya memiliki sekitar setengah diberbagai jenjang pendidikan dibanding laki-laki dan tingkat pendaftaran tingkat menengah hanya dua pertiga dari laki-laki.

Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi besar di sektor kesehatan. Kebijakan kesehatan terfokus pada pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan publik, khususnya di pedesaan. Fasilitas kesehatan mendapat prioritas adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya pencegahan, khususnya penyediaan supli air minum/bersih, imunisasi, perbaikan nutrisi dan pengawasan terhadap penyakit menular. Akibat kebijakan tersebut proporsi jumlah kelahiran yang dibantu dengan tenaga medis dibandingkan yang lahir tanpa bantuan dengan tenaga medis atau bantuan dengan dukun beranak mengalami peningkatan dari 40,7 persen tahun 1992 menjadi 68,4 persen tahun 2002 (BPS, 2000).

Kelahiran dengan bantuan tenaga medis mempunyai hubungan yang positif dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan, khususnya klinik-klinik dipedesaan merupakan usaha pemerintah yang penting untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang berarti dapat mengembangkan dan memperbaiki kondisi sumberdaya manusia, khususnya dipedesaan.

2.1.5. Kebijakan Publik dan Pengeluaran Pemerintah

Masalah isu keuangan dan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan tidak cukup. Menurut Kwapong (2008) dalam studinya di Ghana dalam kaitannya untuk mendesain dan menerapkan kebijakan penghapusan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Untuk itu pengurangan kemiskinan perlu dikaitkan dengan isu kelembagaan yang membantu dan memadai dalam proses implementasi dan perencanaan pengurangan kemiskinan. Perlu ada keterkaitan memilih faktor kelembagaan dan kebijakan perencanaan agar implementasinya kebijakan efektif.

Komponen kelembagaan terdiri dari seperangkat kekuatan didalam lingkungan sosial politik dimana individu-individu dan kelompok-kelompok saling berhubungan.

Menurut laporan Bank Dunia (2000), Ghana telah berhasil mengurangi angka kemiskinan karena menghubungkan faktor kelembagaan dengan kebijakan sosial Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Tahun 1992 angka kemiskinan di Ghana sebesar 52 persen, tahun 2006 turun menjadi 28 persen dan sudah melebihi target 2015 MDG.

Lima dimensi di Ghana yaitu (1). income/ consumption, (2). kesehatan, (3). pendidikan,(4). keamanan dan (5). empowerment di pedesaan Ghana menjadi persoalan besar

dibanding di perkotaan. Yang menjadi masalah bagi para Perencana atau Pemerintah adalah jasa publik dan infrastruktur lebih terkonsentrasi diperkotaan. Hal ini menyebabkan kaum muda berpindah dari pedesaan ke perkotaan, karena tidak mampu mendapatkan keuntungan-keuntungan dari ketenaga kerjaan. Mereka kaum tunawisma dan putus asa dengan tidak adanya akses ke jasa-jasa.

Empowerment adalah proses meningkatnya kapasitas individu atau kelompok untuk membuat bermacam-macam pilihan dan mengubah bentuk aneka pilihan pada hasil yang diinginkan dari tindakan yang dipilih. Pada proses ini tindakan ke dua-duanya membangun individu dan aset kolektif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari organisasi dalam konteks kelembagaan yang mengurus/mengatur penggunaan aset-aset (sumberdaya).

Ada beberapa faktor yang dapat mengatasi lima dimensi kemiskinan dalam mengurangi kemiskinan (Kwapong, 2008).

Visi adalah suatu karya kolektif yang harus melibatkan keikutsertaan semua stakeholder (aktor-aktor) dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan. Didalam merumuskan kebijakan ada istilah penguasaan dan kerikutsertaan yang perlu digunakan bersama-sama, walau ada perbedaan pengertian diantara keduanya. Tetapi keduanya menekankan pada suatu hasil tertentu.

Penguasaan adalah tradisi/ kebiasaan dan institutions otoritas (penguasa) di suatu negara. Ini meliputi kegiatan Pemerintah terpilih untuk memonitor dan kapasitas pemerintah secara efektif merumuskan dan mengeluarkan kebijakan, warga negara harus menghargai dan patuh. Kedudukan institusi untuk mengurangi interaksi sosial dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Keikutsertaan adalah proses yang mencerminkan dimana stakeholder (aktor-aktor) yang terlibat mempengaruhi dan merupakan bagian yang mengendalikan prioritas yang telah ditentukan oleh policy making (pembuat kebijakan), alokasi sumberdaya dan akses-akses ke jasa-jasa dan barang-barang publik.

Participatory (penguasaan) adalah proses dimana masyarakat mendapat manfaat dari suatu proyek yang didesain dan implementasi kebijakan yang dibuat dapat mempengaruhi masyarakat.

Community –Driven Development (CDD) menerangkan inti dari participatory empowerment seperti yang dijelaskan

oleh Bank Dunia (2002), pengalaman menunjukkan (1). Aturan main yang bersih, (2). Akses informasi, (3). Kapasitas yang sesuai (4). didukung keuangan, (5). kaum miskin secara efektif mengorganisir dalam rangka mengidentifikasi prioritas masyarakat dan mengetahui permasalahan lokal, aktif bekerjasama dengan pemerintah lokal dan institution (aturan-aturannya) mendukung satu sama lain.

Yang baik adalah penguasaan menjelaskan pemasukan dan penggunaan keikutsertaan semua kelompok masyarakat, tanggung jawab, integritas dan transparansi dari tindak pemerintah lokal dalam menjelaskan dan mengejar sasaran bersama.

Dari sisi manajemen memerlukan suatu kapasitas untuk memenuhi tanggung jawab publik dengan pengetahuan, ketrampilan, sumber daya dan prosedur yang mendukung kerjasama (partnerships). Ini membutuhkan pelatihan/ pendidikan agar dari sisi manajemen mendukung keberhasilan sasaran kebijakan pemerintah.

Tindakan-tindakan tersebut diatas faktor yang menyebabkan sasaran kebijakan Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan berhasil.

Kebijakan Publik termasuk kebijakan sosial dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam pembangunan dan meningkatkan modal sosial. Pemerintah dapat menciptakan dimana modal sosial suatu komunitas dapat dikembangkan atau sebaliknya.

Modal sosial (Debray Ray, 1998), kekuatan masyarakat tradisional untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan ekonomi tidak akan efektif tanpa memasukkan faktor sosial dan budaya. Modal sosial yang positif dapat membuka peluang pembangunan ekonomi (Kimsley, 1999)

Hukum, kebijakan dan program-program Pemerintah dapat dijadikan perangkat yang penting dalam meningkatkan modal sosial yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi pembangunan (Suharto, 2005).

Menurut Bridgman dan Davis (2004), kebijakan publik berkait dengan ketetapan atau keputusan Pemerintah untuk melakukan tindakan yang dianggap akan membawa dampak positif untuk kehidupan warganya atau apa yang akan dipilih Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan (Policy) adalah instrumen Pemerintah bukan hanya dalam arti Government (aparatur negara) melainkan

Governance yang menyentuh berbagai kelembagaan baik swasta, dunia usaha, maupun masyarakat.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya atau finansial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat demi kepentingan publik atau masyarakat banyak.

Beberapa strategi kebijakan publik yang mempengaruhi tumbuh kembangnya modal sosial (Suharto, 2007)

1. Memperkuat kepercayaan sosial (Sosial Trust) melalui
 - Model integrasi dan relasi didalam dan diluar lembaga Pemerintah
 - Proses-proses yang mampu mengatasi konflik dan pertentangan berdasarkan prinsip “win-win Policy”
 - Desentralisasi dalam pengambilan keputusan
2. Menumbuh kembangkan nilai-nilai bersama melalui
 - Kurikulum pendidikan (pelatihan)
 - Hukum dan kebijakan kesetaraan
 - Perasaan bersama-sama mengenai identitas dan kepribadian sebagai satu negara dan bangsa
 - Peraturan yang mempromosikan nilai-nilai sosial positif, seperti hak azazi manusia, hak-hak publik’
 - Kepastian standar
3. Mengembangkan kohesifitas dan altruisme melalui
 - Pengurangan pajak bagi perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan sosial atau tanggung jawab sosial (Perusahaan corporate social responbility)
 - Registrasi dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan kedemawanan sosial
4. Memperluas partisipasi lokal melalui
 - Pendanaan proyek-proyek kemasyarakatan
 - Dukungan bagi program pengembangan masyarakat (community development), guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan lokal
 - Inisiatif-inisiatif yang memperkuat keluarga
5. Menciptakan jaringan dan kolaborasi melalui
 - Kolaborasi diantara lembaga-lembaga Pemerintah dan antara lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga Swadaya masyarakat serta lembaga usaha
 - Dukungan terhadap organisasi-organisasi sukarela untuk membangun jaringan-jaringan aliansi
6. Meningkatkan keterlibatan warga masyarakat dalam proses tata pemerintah yang baik (Good Governance) melalui

- Kampanye agar orang terlibat dalam proses pemilihan pemerintah pusat dan daerah secara demokrasi
- Konsultasi dan advokasi kebijakan bagi warga masyarakat
- Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penganalisaan implementasi
- Promosi dan sosialisasi konsep mengenai masyarakat warga yang aktif
- Penyediaan sarana informasi Pemerintah yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan strategi kebijakan publik yang difokuskan pada pengembangan modal sosial

1. Meningkatkan partisipasi didalam masyarakat sehingga terdapat kesempatan yang luas dan kemampuan yang lebih dalam mencapai tujuan bersama
2. Meningkatkan partisipasi dalam proses-proses demokrasi sehingga Pemerintah pusat dan lokal lebih akuntable dan terbuka dalam mendengarkan beragam saran dan aspirasi masyarakat
3. Memperkuat aksi bersama yang merefleksikan perasaan tanggung jawab bersama.
4. Tumbuhnya dukungan bagi dan kepercayaan diri pada individu dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasinya.
5. Memperkuat perasaan memiliki, identitas dan kebanggaan bersama sebagai satu warga masyarakat.
6. Menurunkan tingkat kejahatan, korupsi dan aliansi karena meningkatnya keterbukaan, kontrol sosial, kerjasama harmonis.
7. Meningkatkan hubungan dan jaringan antara sektor pemerintah, swasta, lembaga sukarela, dan kelompok.
8. Terjadi tukar-menukar gagasan dan nilai diantara keragaman dan pluralisme warga masyarakat.
9. Rendahnya biaya transaksi karena adanya koordinasi dan kerjasama yang erat dan memudahkan penyelesaian konflik.
10. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespon guncangan karena adanya jalinan kerjasama yang erat antara seluruh komponen warga masyarakat.
11. Memperkuat kemampuan dan akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.

Format anggaran Pemerintah Indonesia, pengeluaran pendidikan mencakup sektor pendidikan dan kebudayaan, sosial, pemuda dan olah raga, agama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibidang kesehatan mencakup sektor tenaga kerja, kependudukan dan keluarga sejahtera serta kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja (Lewis dan Chakeri, 2004)

Kebijakan publik yang salah satunya diketahui dari adanya pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan sosial termasuk didalam kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam membangun dan meningkatkan modal sosial. Pemerintah dapat menciptakan kondisi dimana modal sosial suatu komunitas dapat dikembangkan atau sebaliknya.

Elemen modal sosial seperti kepercayaan, kohesitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme (Blakeley dan Suggate, 1997, Suharto 2005 a, Suharto 2005 b) seperti:

1. Meningkatnya tanggung jawab terhadap kepentingan publik
2. Meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi.
3. Memperkuat keserasian masyarakat.
4. Menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan

2.1.6.Modal Sosial, Pemerataan Pendapatan, dan Kesejahteraan

Kurangnya perhatian oleh ahli ekonomi adalah ketika merumuskan berbagai jenis modal, bahwa manusia sebagai aktor bertindak tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan atas dasar kepentingan pribadi dan bersifat independen. Dalam kenyataannya tindakan manusia juga tindakan ekonominya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya.

Partha Dagupta dan Ismail Serageldil (1999) menyatakan modal dalam konteks modal sosial mempunyai ciri-ciri:

1. Memerlukan investasi awal dan maintenance yang terus menerus dengan ekspektasi (return) dimasa yang akan datang
2. Tidak diperjual belikan di pasar.
3. Tidak dibangun secara individual
4. Tidak berkurang, tetapi justru bertambah bila digunakan.

Terdapat berbagai defenisi tentang modal sosial. Salah satunya adalah Christiaan Grootaert dan Thierry van Bastelaer (2002). Social Capital adalah Institution, Relationships,

Attitude, an value that govern interaction amongs people and contribute to economic and social development.

Putnam (1993) modal sosial memiliki tiga bentuk yaitu kepercayaan (trust), norma (norm) dan jejaring (network social).

Fukuyama (1995) senada dengan Putnam, modal sosial adalah trust , kemampuan orang-orang (masyarakat) bekerja sama untuk kepentingan umum (collection action) di dalam kelompok orang .

Tiga (3) bentuk modal sosial diungkap Coleman (1990):

1. Kewajiban dan harapan didasarkan kepercayaan (trust worthiness) lingkungan sosial.
2. Kapasitas aliran informasi struktur sosial
3. Norma-norma yang dijalankan dengan berbagai sangsi.

Bentuk ini tergantung dua (2) elemen

1. Kepercayaan lingkungan sosial bahwa kewajiban pasti dilunasi.
2. Luas aktual berbagai kewajiban (the actual extend to obligation)

Terlepas dari defenisi yang diajukan oleh para ahli, modal sosial relevan jika dikaitkan dengan pembangunan dan kemiskinan sebab menurut Christiaan Grootlaert dan Bastelaer (2002) “ Since it entered conseptual and emperical debates, social capital has captured the imigration of development reasearch and practitioner as a particularly promoting tool for alleviating poverty”

Dengan didasari pada pemahaman bahwa modal sosial memberi sumbangan berarti bagi pembangunan (ekonomi) pada umumnya, pengurangan kemiskinan pada khususnya, maka studi pada kelompok-kelompok etnis tertentu mampu meraih prestasi (achievement) dan pencapaian-pencapaian (attaitment) lain dalam derajat yang lebih tinggi dibanding etnis lainnya.

Atas dasar norma dan nilai-nilai luhur seringkali suatu etnis tertentu memiliki tindakan bersama (collective action) yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat etnik yang bersangkutan. David Mosse (2006) dalam penelitiannya di daratan Tamil Tenggara menemukan perbedaan perilaku antara orang-orang Vayalur dan orang-orang Alapuram dalam kaitannya dengan pengelolaan air. Tindakan bersama (Collection Action) etnis Vayalur membawa dampak positif bagi kehidupan ekonomi dibanding etnik Alapuram yang tidak memiliki tindakan kolektif.

Aksi kolektif (Collection Action) masyarakat Karibia dimana walau keluarga terpisah secara geografis, tetapi jejaring (Network) keluarga (Kekerabatan) sangat kuat. Ikatan keluarga masyarakat Karibia didorong oleh keperluan dasar (Basic need) bahwa masing-masing individu harus memelihara hubungan keluarga dengan cara mengirim uang bagi keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi basic need walau secara geografis mereka terpisah dengan jarak yang sangat jauh.

Pengaruh positif yang diberikan oleh modal sosial dalam penciptaan kesejahteraan individu dan keluarga tidak secara langsung. Modal sosial mempengaruhi kesejahteraan melalui akses terhadap kredit, akumulasi aset, dan aksi kolektive (Grootaert, 1999).

Dalam hal ini apa yang dikemukakan Grootaert (1999) mengenai peran perkumpulan atau asosiasi lokal sebagai wahana distribusi informasi dan pertukaran pengetahuan menjadi relevan. Dengan kata lain peluang seseorang untuk mendapatkan akses kredit dan melakukan akumulasi aset menjadi terbuka ketika ia memiliki informasi tentangnya atau memiliki pengetahuan tentangnya dan informasi dan pengetahuan tersebut diperoleh seseorang pada perkumpulan atau asosiasi yang didalamnya ia terlibat.

Keanggotaan seseorang didalam suatu perkumpulan atau kelompok mendapat manfaat ekonomis (akses terhadap kredit dan akumulasi aset) sangat tergantung pada dua (2) hal yaitu heterogenitas kelompok dan partisipasi individu dalam mengambil keputusan kelompok. Semakin homogen karakteristik keanggotaan suatu kelompok semakin tinggi manfaat bagi akses terhadap kredit dan akumulasi aset. Semakin sering individu terlibat dalam pengambilan keputusan kelompok (dilihat dari intensitas kehadiran dalam pertemuan kelompok) semakin tinggi manfaat yang diperoleh individu dalam kelompok tersebut.

Berbeda dengan yang terjadi pada akumulasi aset dan akses terhadap kredit, aksi kolektif lebih mudah dilakukan dalam sebuah kelompok yang homogen. Homogenitas atas dasar sanak famili, kasta, latar belakang etnis, dan agama akan mempermudah terjadinya aksi kolektif. Grootaert (1999) menyimpulkan bahwa semakin sejahtera kehidupan ekonomi suatu keluarga, semakin kurang terlibat dalam aksi kolektif.

Menjelaskan kejadian kemiskinan yang dialami masyarakat Tionghoa yang memiliki pola relasi (Jaringan/ Network) khas yang disebut Guanxi. Kemiskinan dipandang

sebagai akibat tersingkirnya individu atau keluarga di dalam arena ekonomi pasar. Ekonomi pasar mengusung agenda modernisasi secara sosiologi menuntut semakin tingginya kemampuan dan skill seseorang. Artinya bila seseorang tidak mampu mentransformasikan kemampuan dan skilnya dalam kancah modernisasi cepat atau lambat secara alamiah dia akan tersingkirkan .

Jaringan mencakup tiga (3) hal. Yaitu relasi personal, pemanfaatan relasi personal, dan kewajiban serta resiprositas. Relasi personal akan membangun sebuah informal network, Kewajiban dan resiprositas akan membangun trust dan kredit. Baik network, trust, kredit akan memfasilitasi seseorang atau keluarga memperoleh sumber-sumber ekonomi sehingga mereka dapat terlepas dari kejadian kemiskinan.

Secara sosiologis orang cenderung suka berkumpul dalam kelompok yang homogen. Bahwa kelompok yang homogen lebih banyak memfasilitasi adanya aksi kolektif terutama dalam menjaga aset bersama, tetapi tidak cukup significant untuk membantu terutama membuka akses terhadap kredit dan akumulasi modal dibanding masyarakat yang heterogen.

Menurut Coleman (1998) dalam studinya pada Etnis di Amerika Serikat menunjuk bahwa keluarga dan masyarakat dengan modal sosial yang tinggi mampu mencapai tingkat pendidikan yang tinggi dan menjadi kelas yang lebih independen dibanding keluarga atau masyarakat dengan modal sosial yang rendah (Dwyer, 2006)

Tiga (3) arus utama (mainstream) teori modal sosial

1. Teori Putman (1993) dan Fukuyama (1995)
2. Teori Coleman (1988)
3. Teori Bourdieu (Dwyer, 2006)

Menurut ke tiga tokoh sepakat modal sosial merupakan sumberdaya. Coleman memandang modal sosial sebagai sumberdaya-sumberdaya sosial yang tersedia bagi individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mencapai mobilitas sosial selama spektrum modal sosial merupakan sumberdaya yang terus memfasilitasi individu atau keluarga memiliki sumberdaya manusia (human capital).

Putnam (1993) modal sosial dapat memberi sokongan terciptanya masyarakat sipil (Civil society) dan suatu yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembentukan institusi-institusi yang demokrasi. Bagaimanapun masyarakat sipil dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat

dipisahkan, karena agar masyarakat demokrasi dapat berjalan diperlukan masyarakat sipil yang kuat dan aktif.

Bourdieu (2005), memandang bahwa kekuatan dan ketimpangan akan dihasilkan didalam jejaring sosial (Dwyer, 2006). Definisi modal sosial memberikan penekanan pada jejaring sosial (social Network) yang memberi akses pada sumber-sumber daya kelompok. Diharapkan seorang individu pada akhirnya akan menikmati manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi hanya akan dinikmati individu apabila terus menerus terlibat memiliki akses sumberdaya kelompok (Group Resource) dalam kelompok tersebut (Winter, 2000). Dalam konteks ini modal sosial sebagai suatu yang bersifat instrumental.

Woolcock dan Narayan (2000) mensintesisasikan berbagai pengertian modal sosial dan hasil sintesis tersusun dalam empat (4) katagori modal sosial (Christiaan Grootaert dan Theiry Bastelear, 2000)

1. PERSFEKTIF KOMUNITARIAN

Modal sosial digambarkan dalam pengertian organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok lokal. Persfektif ini membantu para praktisi pembangunan untuk memusatkan perhatian pada peran relasi sosial dalam mengurangi kemiskinan.

2. PERSFEKTIF JEJARING (NET WORK)

Persfektif jejaring mendefenisikan modal sosial dengan mengacu pada berbagai relasi antara berbagai perkumpulan (asosiasi) vertikal dan horizontal.

Berbagai hubungan ini dibedakan menjadi hubungan interkomunitas dan hubungan antarkomunitas.

3. PERSFEKTIF INSTITUTIONAL

Dengan persfektif ini dapat diketahui bahwa lingkungan Institutional, Legal dan Politis (Institutional, Legal, and Polical Enviroment) merupakan penentu penting dan utama yang kuat atau tidaknya jejaring masyarakat.

4. PERSFEKTIF SINERJI

Persfektif ini memusatkan perhatian pada berbagai hubungan diantara dan didalam berbagai pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan asumsi tidak satupun aktor ekonomi atau pelaku pembangunan (negara, swasta, dan masyarakat) mempunyai akses sendiri-sendiri terhadap sumber-sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

Konsep-konsep dan interpretasi mengenai modal sosial sangat banyak dan beragam, tetapi muncul konsensus bersama bahwa pada dasarnya modal sosial berarti kemampuan para pelaku (aktor) untuk menyamakan berbagai manfaat (benefit). Melalui nilai-nilai luhur keanggotaannya dalam jejaring sosial atau struktur sosial lainnya menekankan pada pentingnya peran berbagai perkumpulan atau asosiasi-asosiasi lokal tersebut memainkan peran dalam tiga cara:

1. Berbagi informasi diantara para anggota perkumpulan.
2. Mengurangi berbagai perilaku opportunistik
3. Memfasilitasi pengambilan keputusan

Studi yang dilakukan oleh Haung (2003) di Chinese mengenai suatu ikatan atau hubungan atau sistem atau sebuah jejaring mengidentifikasi tiga (3) jenis relasi personal didalam pertukaran sosial (Social Exchange) masyarakat Tionghoa:

1. Ikatan ekspresif pada umumnya terjadi diantara para anggota keluarga, sahabat dekat, dan kelompok-kelompok lain yang menyenangkan
2. Ikatan instrumental yang didasarkan pada pencapaian sasaran spesifik dan terjadi diantara dua orang yang saling berinteraksi dalam jangka waktu pendek.
3. Ikatan campuran yang terjadi antara orang yang saling mengenal dan berharap untuk bisa saling berinteraksi dalam jangka waktu yang lama.

Bagi orang chinese ke tiga ini sering disebut GUANXI berarti hubungan tetapi bisa juga berarti penggunaan otoritas seseorang (the use of someones authority) untuk memperoleh manfaat ekonomis atau politis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. GUANXI dibangun dan dijaga melalui saluran-saluran formal dan pribadi seperti jamuan ramah tamah dan hadiah (Huang, 2003).

Putnam (1993), Coleman (1998), modal sosial merupakan seperangkat hubungan horizontal (horizontal association) dan vertikal perilaku masyarakat di dalam dan antara seluruh pihak dalam masyarakat. Kerjasama sosial (Network of civic anegeement) dan norma (norm) dan kepercayaan (trust) hal yang mempengaruhi produktivitas suatu masyarakat. Kemampuan orang-orang dalam bekerjasama untuk tujuan bersama dalam group berperan dalam mekanisme alokasi sumberdaya. Keistimewaan nya adalah organisasi sosial seperti network, norma dan trust mengikat secara legal

dipegang teguh sebagai suatu komitmen moral dapat meningkatkan potensi produktivitas masyarakat.

Pengertian trust secara sederhana adalah willingness to take risk yaitu interaksi-interaksi yang didasari perasaan yakin (sense of confidence) bahwa orang lain akan memberi respon sebagai mana yang diharapkan dan akan saling mendukung. Jadi ada perasaan aman dalam berinteraksi (perceived safety), dengan orang. Perasaan ini memiliki wilayah jangkauan (radius of trust) yang didefinisikan sebagai the circle of people among whom cooperative norm are operative.

Trust (Fukuyama, 1993) dalam kehidupan ekonomi tergantung kepada ikatan kepercayaan sosial yang memperlancar transaksi, memberdayakan kreatifitas perorangan dan menjadi alasan kepada perlunya aksi kolektif. Ini merupakan ikatan tidak terucap dan tidak tertulis, tetapi didukung oleh keeratan (cohesiveness) civil society dan kekuatan komunitas

Norma, dapat dibedakan mulai dari norma resiprositas antara dua teman, sampai kepada yang lebih mendasar, misalnya norma keagamaan. Norma sosial menyediakan kontrol sosial yang efektif. Ia tidak tertulis, namun menjadi panduan untuk menentukan apa pola perilaku yang diharapkan dari orang-orang dalam suatu masyarakat yaitu perilaku-perilaku yang dinilai baik di masyarakat.

Dari berbagai defenisi dan pengertian modal sosial ada beberapa hal yang terkandung didalamnya :

1. Bahan baku utama yang terbangun dari civil society.
2. Terciptanya dari ratusan sampai ribuan interaksi antar orang setiap hari
3. Tidak berlokasi didalam diri pribadi atau dalam struktur sosial, tetapi pada space of between people
4. Pelengkap Institusi
5. Bukan milik organisasi, pasar ataupun negara
6. Fenomena yang tumbuh daari bawah (bottom up)
7. Berasal dari orang-orang yang membentuk koneksi (hubungan) sosial dan network (kerjasama)
8. Tidak diciptakan oleh individu
9. Sangat tergantung dari kapasitas masyarakat (atau organisasi) untuk membentuk asosiasi dan jaringan baru
10. Hadir karena ada kontrol sosial (persetujuan antara sesama warga atau kelompok tentang azas yang berkait dengan kehidupan bersama

Pemberdayaan masyarakat pedesaan khususnya masyarakat miskin tidak akan berhasil jika tidak dilandasi pada penguatan modal sosial setempat. Elemen modal sosial yang penting adalah tata nilai, kompensasi sumberdaya manusia, manajemen sosial, kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintah.

Konsep modal sosial diterapkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. World Bank (1998) memberi perhatian yang tinggi untuk mengkaji peranan dan implementasi modal sosial khususnya untuk pengentasan kemiskinan. Modal sosial menuntut partisipasi masyarakat dalam jaringan, resiprositas, trust, sosial norm, sifat keumumam pemilikan (the common) dan sikap warga yang proaktif.

Menurut World Bank (1998) modal sosial adalah ...a society include the Institution, the relationships, The attitudes, and value that govern interaction among people and contribute to economics and social development. Namun modal sosial tidak sederhana hanya sebagai jumlah dari seluruh institusi yang ada, tetapi semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Untuk itu dalam modal sosial diperlukan adanya :

1. Nilai saling berbagi (Shared value)
2. Pengorganisasian peran-peran (rules) yang diekspresikan dalam hubungan personal (personal relationships)
3. Kepercayaan (trust)
4. Common sense tanggung jawab bersama (common responsibility)

Pada umumnya ketidak berhasilan proyek-proyek pemerintah untuk memberdayakan masyarakat disebabkan belum diperhatikannya tentang pentingnya penguatan modal sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu setelah proyek berakhir semua kegiatan akan berakhir. Pada desa-desa atau daerah-daerah dimana memiliki modal sosial yang baik cenderung memiliki kemampuan lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi dilingkungannya.

Ketimpangan kekuatan modal sosial pada masyarakat bisa dijadikan petunjuk kemungkinan terjadinya gejala ketidak berdayaan masyarakat dalam mengatasi persoalannya dan sekaligus menjadi petunjuk tentang lemahnya kelembagaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setempat.

Kemerosotan tata nilai masyarakat pedesaan merupakan faktor penting ketidak berdayaan masyarakat dalam mengatasi persoalan yang terjadi di lingkungannya.

Upaya pengentasan kemiskinan tidak saja harus disejajarkan dengan pemberdayaan masyarakat, namun perlu juga diintegrasikan dengan transpormasi sosial budaya dan perekonomian pedesaan.

Model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dinilai efektif bila dilandasi oleh penguatan modal sosial setempat. Penguatan tata nilai merupakan inti dari penguatan modal sosial dan efektif jika dimulai dari penguatan kepemimpinan masyarakat , manajemen sosial dan keorganisasian masyarakat.

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan alami. Perubahan-perubahan tersebut akan selalu diikuti dengan berbagai penyesuaian sehingga dicapai suatu keseimbangan dinamik. Artinya perubahan dan keseimbangan merupakan proses yang selalu dan terus menerus terjadi.

Masyarakat Indonesia secara sosial historik telah membentuk suatu keseimbangan jangka panjang yang merupakan resultan dari keberadaan lingkungan fisik, nilai-nilai yang dianut dan inovasi-inovasi yang diterima oleh masyarakat. Meski demikian, keseimbangan pada mulanya bersifat dinamik, pada akhirnya bersifat statik. Hal ini disebabkan oleh karakteristik “sikap hidup” dan “norma-norma” yang dihasilkan oleh keseimbangan jangka panjang relatif tidak menunjang terjadinya dinamika perubahan.

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi orang-orang dalam suatu komunitas. Namun modal sosial jarang melibatkan pengukuran interaksi itu sendiri, melainkan hasil dari interaksi tersebut seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Interaksi dapat terjadi dalam skala individual. Interaksi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional.

Interaksi secara institusional dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi yang lain. Interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara untuk mencapai tujuan bersama, yang kadang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung lama.

Interaksi semacam ini melahirkan modal sosial berupa ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk tujuan bersama kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang. Ini dapat dijadikan sebagai sumber yang digunakan untuk kegiatan atau proses produksi maupun untuk interaksi bagi kegiatan dimasa depan.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong royong, merasa aman berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sedang masyarakat yang memiliki modal sosial yang rendah tampak ada kecurigaan satu sama lain, merebak kelompok kita dan kelompok mereka, tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial, serta muncul kambing hitam. Modal sosial sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi intim dan konsisten. Sehingga modal sosial menunjuk pada jaringan-jaringan (network), norma-norma (norm) dan kepercayaan (trust) yang berpotensi pada peningkatan produktivitas masyarakat. Selanjutnya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai pendapat Bourdieu (2005) menyatakan modal sosial merupakan asset nyata dalam masyarakat dalam artian sosial nilainya tidak kalah penting dengan modal ekonomi, dengan modal sosial yang tinggi/baik, akan menimbulkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan,

Pengaruh positif modal sosial terhadap peningkatan kesejahteraan melalui akses kredit, akumulasi asset, kolektivitas. Peran perkumpulan atau asosiasi lokal adalah sebagai wahana distribusi informasi dan pengetahuan. Homogenitas anggota kelompok seperti hubungan sanak famili, kasta, etnis, dan agama, mempermudah collection action.

Relasi personal akan membangun informal network. Pemanfaatan relasi personal, kewajiban, resiprositas membangun trust. Network dapat memfasilitasi memperoleh sumberdaya ekonomi seperti mempermudah akses terhadap sumberdaya ekonomi (kredit, memelihara asset bersama dll) sehingga masyarakat dapat terhindar dari kejadian kemiskinan.

Bourdieu (2005), Dwyer (2006), menekankan modal sosial pada jejaring sosial (social network) yang memberi akses pada sumber-sumber daya kelompok sehingga individu menikmati manfaat ekonomi apabila terus-menerus terlibat memiliki akses sumberdaya kelompok dalam kelompok tersebut (Winer, 2006).

Dari pemahaman diatas peran modal sosial dapat dijadikan instrumen:

1. Organisasi dan kelompok-kelompok lokal. Peran relasi sosial (social network) dapat mengurangi kemiskinan
2. Hubungan atau relasi perkumpulan /asosiasi berbentuk vertikal dan horizontal (interkomunikasi dan antar-komunikasi)
2. Lingkungan institusional, legal, politik menentukan kuat tidaknya jejaring masyarakat (social network).
3. Harus ada hubungan kerja diantara dan didalam berbagai aktor (Pemerintah, Swasta. Masyarakat) terhadap akses sumberdaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Asumsi tidak ada satu aktorpun dapat akses sumberdaya secara sendiri-sendiri

2.1.7. Parameter dan Indikator Modal Sosial

Menurut Putnam (1993) modal sosial bersifat komulatif dan bertambah dengan sendirinya (self reinforcing), karena modal sosial tidak akan berkurang jika dipergunakan melainkan semakin meningkat.

Woolcock dan Narayan (2000) mensintetiskan berbagai pengertian modal sosial dan hasil sintetis tercantum dalam empat (4) katagori modal sosial (Christiian Grootaert dan Theiry van Bastelaar, 2000)

1. **Perspektif Komunitarian**
Organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok lokal membantu praktisi untuk memperhatikan peran relasi sosial dalam mengurangi kemiskinan
2. **Perpektif Jejaring (network)**
Mengacu pada berbagai relasi antara berbagai perkumpulan (asosiasi) vertikal dan horizontal menjadi hubungan inter komunitas dan antar komunitas
3. **Perspektif Institutional**
Diketahui lingkungan institusional legal, dan politik (Institutional Legal and Political enviromental) penentu penting dan kuat atau ada tidaknya jejaring sosial
4. **Perpektif Sinerji**
Berbagai hubungan didalam dan diantara Pemerintah dan Masyarakat civil dengan asumsi tidak satupun aktor ekonomi atau pelaku pembangunan (negara, swasta dan masyarakat) mempunyai akses sendiri-sendiri terhadap sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

Dengan konsep-konsep dan interpretasi modal sosial muncul konsensus, bahwa modal sosial merupakan kemampuan pelaku (aktor) untuk menyamakan manfaat (benefit).

Melalui keanggotaan jejaring sosial atau struktur sosial menekankan pentingnya peran perkumpulan atau asosiasi lokal sebagai berikut:

1. Berbagi informasi diantara para anggota perkumpulan
2. Mengurangi perilaku opportunistic
3. Memfasilitasi pengambilan keputusan.

Studi yang dilakukan Huang (2003) di Chinese mengenai ikatan atau hubungan atau sistem jejaring (network) mengidentifikasi tiga(3) jenis relasi sosial (social exchange) pada masyarakat Tionghoa Quanxi yaitu;

1. Ikatan ekspresif umumnya terjadi antara para anggota keluarga (hubungan kekerabatan), sahabat dekat, dan kelompok-kelompok lainnya menyenangkan.
2. Ikatan instrument yang didasarkan pada pencapaian sasaran spesifik yang terjadi diantara ke dua orang yang saling berinteraksi dalam jangka pendek
3. Ikatan campuran yang terjadi antara orang yang saling mengenal dan berharap untuk bisa berinteraksi dalam jangka waktu lama

Colleman (1990) mengatakan modal sosial menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain. Berdasarkan norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar (Fukuyama, 1995). Merujuk Ridell (1997) ada tiga (3) parameter modal sosial yaitu Trust (Kepercayaan), Norms (Norma-Norma) Dan Nets Work (Jaringan).

1. KEPERCAYAAN

Fukuyama (1995) kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama, merupakan kepercayaan sosial.

Cox (1995: 5) masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial bersifat positif, hubungan-hubungan yang bersifat kerjasama “ We expect others to manifest good will, we trust our fellow human beings, we tend to work cooperatively, to collaborate with others in collegial relationships

2. NORMA

Norma terdiri dari pemahaman tentang nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma dapat bersumber agama, panduan moral, maupun standar-standar seluler seperti kode etik profesional. Sementara Putman (1993) dan Fukuyama (1995) mengatakan bahwa norma-norma itu dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah untuk mendukung iklim kerjasama. Norma merupakan prakondisi, maupun produk dari kepercayaan sosial

3. JARINGAN

Menurut Putman (1993), infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh, dan orang dapat mengetahui dan bertemu dengan orang lain. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain, kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal, maupun informal (Onyx, 1996). Putman (1995) berargumentasi bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat dari partisipasinya itu

Berdasarkan parameter di atas, beberapa indikator kunci yang dijadikan ukuran modal sosial. Antara lain (Spellerber, 1997)

1. Perasaan identitas
2. Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi
3. Sistem kepercayaan dan ideologi
4. Nilai dan Tujuan
5. Ketakutan-ketakutan
6. Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat
7. Persepsi mengenai akses pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial)
8. Opini mengenai kinerja Pemerintah yang dilakukan terdahulu
9. Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya
10. Tingkat kepercayaan, kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya, harapan-harapan yang ingin dicapai dimasa depan

Indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang digunakan UNDP (2007), adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat inflasi yang merupakan indikator kesejahteraan bersifat fisik. Sementara indikator non fisik belum terukur seperti variabel moral, partisipasi masyarakat dalam politik, indeks demokras, perlakuan gender. Variabel-variabel ini hanya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara makro.

Sejak tahun 1970 an, John Rawl, Amartya Sen, Ronald Dworkin dan John Roemer mengakui pentingnya tanggung jawab individual untuk mengubah sumberdaya menjadi hasil akhir yang mencakup kesejahteraan. Mereka lebih senang untuk memahami bahwa paduan antara kebebasan dan sumber daya yang tersedia untuk individu adalah tolak ukur yang pas untuk penilaian sosial (Bank Dunia, 2006)

Rawls (1971), berpendapat bahwa keadilan sosial harus dilandasi dua (2) prinsip :

1. Prinsip menuntut kebebasan yang seluas-luasnya untuk masing-masing orang, sesuai yang dipunyai orang lain
2. Prinsip yang mensyaratkan kesempatan-kesempatan yang dihubungkan konsep “barang keperluan primer” harus terbuka untuk setiap anggota masyarakat.

Bahwa alokasi yang dipilih seharusnya adalah alokasi yang dapat memaksimalkan kesempatan untuk kelompok yang paling tersingkirkan (Seperti masyarakat miskin).

Sen (1985), berpendapat bahwa tiap orang mempunyai “Faktor konversi” dari sumberdaya ketidakan dan kemakmuran yang tidak sama. Semua barang termasuk yang digolongkan sebagai “barang primer” oleh Rawls (1971) merupakan input bagi sistem fungsi dari aksi apa yang dilakukan oleh orang, dan keadaan apa yang orang nikmati dan harga.

Konsep kesetaraan antara satu orang dengan orang lain adalah rangkaian kegiatan yang memungkinkan orang untuk memilih. Keadilan akan terwujud bila individu-individu memperoleh kompensasi untuk aspek-aspek keadaan diluar kendali mereka. Untuk itu SEN mengusulkan suatu distribusi sumberdaya yang memberi kompensasi ke orang karena berbagai perbedaan bawaan yang tidak dapat diubah oleh mereka.

Roemer (1998), dan Dworkin (1981), menyatakan bahwa semua individu memang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri, tetapi ada juga keadaan-keadaan

diluar kendali mereka yang mempengaruhi sebagian besar mereka dapat berusaha sekaligus seberapa besar kesejahteraan yang mereka dapat. Aksi publik karenanya bertujuan menyetarakan “keuntungan” antar orang dari kelompok yang keadaannya berbeda-beda tersebut.

Menurut Bank Dunia (2006) ketidak merataan yang tinggi mempersulit upaya pengurangan kemiskinan apabila :

1. Ketidak merataan terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan pada umumnya akan terjadi lebih dalam dari pada jika pertumbuhan berada pada distribusi yang netral
2. Keefektifan pertumbuhan ekonomi masa mendatang dalam mengurangi kemiskinan akan menurun bila pendapatan awalnya tidak merata.

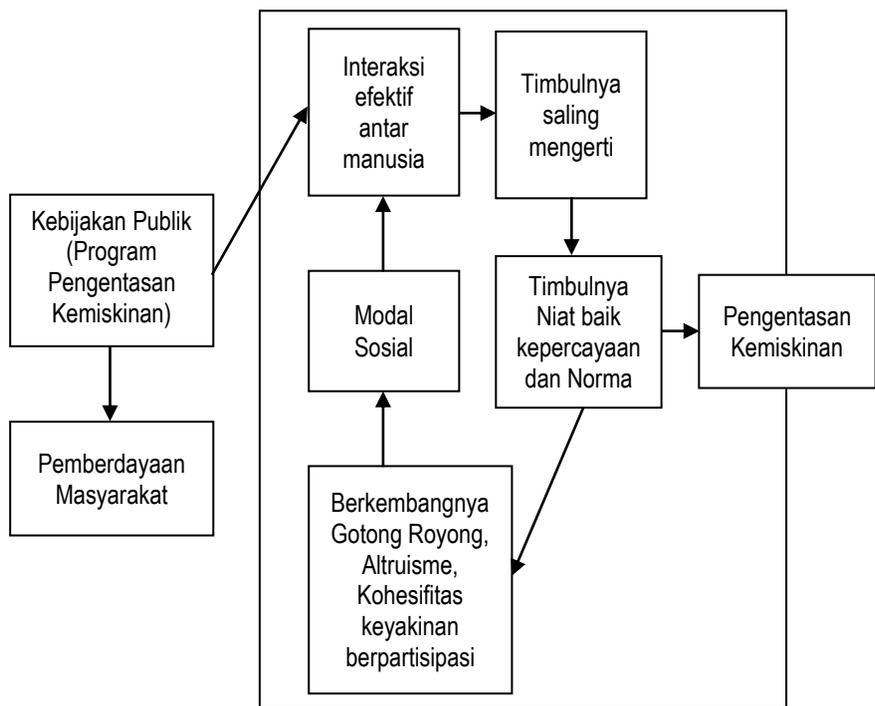
Untuk itu alokasi yang dipilih seharusnya adalah alokasi yang dapat memaksimalkan kesempatan untuk kelompok yang tersingkir (Rawl, 1971).

Perhatian kesetaraan (pemerataan) berakar kuat dalam budaya, agama, dan kondisi filosofis menunjukkan preferensi yang fundamental atas keadilan benar-benar tertanam dalam diri manusia.

Bukti eksperimental menunjukkan bahwa banyak orang meletakkan nilai moneter pada keadilan dan sikap untuk melepaskan uang yang mereka dapat bahwa proses yang melibatkan mereka tidak adil.

Kesejahteraan subyektif menunjukkan bahwa ketidak merataan pendapatan yang tinggi umumnya dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan subyektif yang rendah (Bank Dunia, 2006)

John Rawls (1971), Amarty Sen (2000), Ronald Dworkin (1981a), dan John Roemer (1971), memberi pemahaman tentang pemerataan. Teori keadilan dan pemerataan menolak kesejahteraan akhir (nilai guna) sebagai tolak ukur dari suatu alokasi atas sistem tertentu. Diakui pentingnya tanggung jawab individu untuk mengubah sumberdaya menjadi hasil akhir yang juga mencakup kesejahteraan. Paduan antara kebebasan dan sumberdaya yang tersedia untuk individu adalah lokal ukur yang tepat untuk perilaku sosial.



Gambar 2. Hubungan Kelembagaan Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

PARAMETER MODAL SOSIAL

Merujuk Ridell (1997), 3 parameter *capital social* :

1. Kepercayaan (*Trust*) – (Fukuyama, 1995) (Cox, 1995)
Harapan yang tumbuh dalam masyarakat ditunjukkan oleh perilaku jujur, teratur, kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama (hubungan kerjasama positif), kepercayaan sosial yang tinggi.
2. Norma
Nilai-nilai yang bersumber dari agama, panduan moral, standar (seluler, profesi).
Norma menurut Putnam, 1993, yaitu prakondisi, maupun produk dari kepercayaan sosial (sejarah).
3. Jejaring (Network) Putnam, 1993
Kerjasama antara warga/manusia memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi memungkinkan terjadinya kerjasama. Jejaring sosial yang kuat mengetahui bertemu orang lain kemudian membangun interaksi yang kuat bersifat formal, informal (Onyx, 1996). Memperkuat perasaan kerjasama antar warga dan manfaat dari partisipasi.

INDIKATOR KEMISKINAN

- IKK (Indek Keparahan Kemiskinan)
The Severity Of Poverty yaitu mengukur jarak yang memisahkan pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan.
Rumus Indeks IKK
- Mengukur ketimpangan antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin (*Indeks Distributionally Sensitive Indeks*) yaitu indeks kemiskinan sensitive yang memasukkan dua faktor tersebut yakni koefisien gini

$$S = H [L1 + (I - 1) \text{ gini}]$$

Dimana :

I = jumlah rata-rata *deficit* pendapatan dari orang miskin dari garis kemiskinan dan koefisien gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin

Apabila salah satu faktor tersebut naik (I, G) tingkat kemiskinan bertambah besar.

INDIKATOR KUNCI PARAMETER KAPITAL SOSIAL

1. Perasaan identitas
2. Perasaan memiliki (aliansi) kebersamaan.
3. Nilai/tujuan apa yang didapat dari aliansi
4. Sistem kepercayaan dan ideologi (agama, adat istiadat)
5. Sikap-sikap kepada anggota lain (kejujuran, terbuka)
6. Persepsi terhadap akses pelayanan, sumber dan fasilitas (kemudahan, pekerjaan, transportasi).
7. Opini mengenai kinerja
8. Keyakinan terhadap lembaga-lembaga pengentasan kemiskinan orang-orang umumnya dalam kaitan dengan network.
9. Tingkat kepercayaan, kepuasan hidup dan bidang-bidang.
10. Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan.

PARAMETER KESEJAHTERAAN INDIKATOR BPS (2005) , SUSENAS (2001) + KATAGORI KELUARGA PRA SEJAHTERA BKKBN

Indikator Pra Sejahtera

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu.

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbai, kayu berkualitas rendah, tembok dari plaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air/tidak terlindungi (sungai air hujan).
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam satu minggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam satu tahun.
10. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
11. Sumber pendapatan RT adalah buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain. Luas tanah < 0,5 HA.
12. Kepemilikan TV, motor
13. Kepemilikan tabungan (Susenas 2001).
14. Jumlah anggota keluarga ukuran besar.
15. Tingkat pendidikan rendah (wanita sekolah kecil daripada pria).
16. Kelahiran masih tradisional atau tidak dihadiri tenaga/petugas kesehatan.
17. Kepala keluarga bekerja di sektor informal.
18. Jam kerja singkat.
19. Sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
20. Akses terhadap air minum.

2.2. Dukungan Teori Mutakhir

Modal sosial memerlukan prakondisi suatu etnis. Perbedaan ciri diantara kedua etnis tersebut maka membentuk kekuatan modal sosial yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis partisipatori dan aspek multidimensi terkait Suharno et al. (2019) dan Suharno et al. (2018).

2.2.1 Parameter Modal sosial

Woolcock dan Narayan (2000) mensintetiskan berbagai pengertian modal sosial dan hasil sintesis tersusun dalam empat (4) katagori modal sosial (Christiaan Grootaert dan Theiry van Bastelaer, 2000).

1. **Perspektif Komunitarian**
 Modal sosial digambarkan dalam pengertian organisasi dan kelompok-kelompok lokal. Perspektif ini membantu para praktisi pembangunan untuk memusatkan perhatian pada peran relasi sosial dalam mengurangi kemiskinan
2. **Perspektif Jejaring (*Network*)**
 Perspektif jejaring mendefinisikan modal sosial dengan mengacu pada berbagai relasi antara berbagai perkumpulan (asosiasi) vertikal dan horizontal. Berbagai hubungan ini dapat dibedakan menjadi hubungan antar komunitas dan antar komunitas.
3. **Perspektif Institusional**
 Dengan perspektif ini dapat diketahui lingkungan Institusional. Legal dan politis (*Institutional, Legal and Political Enviromental*) merupakan faktor penentu penting dan utama kuat atau tidaknya jejaring masyarakat.
4. **Perspektif Sinerji**
 Perspektif ini memusatkan perhatian pada berbagai hubungan, Pemerintah dan Masyarakat Sipil. Dengan asumsi tidak satupun aktor atau pelaku pembangunan (negara, swasta dan masyarakat) mempunyai akses sendiri-sendiri terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

Trust adalah interaksi yang didasarkan pada perasaan yakin (*Sense of confident*) bahwa orang lain akan memberi respon sebagaimana yang diharapkan dan akan saling mendukung. Ada perasaan aman untuk berinteraksi dalam berinteraksi (*perceived safety*) dengan orang lain. Perasaan ini memiliki wilayah jangkauan (*radius of trust*) yang didefinisikan sebagai “*the people among who cooperative norm are operation*”.

Menurut Fukuyama (1993) *trust* dalam kehidupan ekonomi tergantung kepada ikatan moral kepercayaan, yang memperlancar transaksi, memberdayakan kreatifitas perorangan, dan menjadi alasan kepada perlunya kolektif. Ini ikatan yang tak terucap dan tidak tertulis. Didukung oleh keeratan (*cohesiveness*) civil society dan kekuatan komunitasnya, tidak boleh individualisme. Jika institusi sosial berperan besar, *trust* dalam masyarakat tinggi

Norma, dapat dibedakan mulai dari norma resiprositas antara dua teman, sampai kepada yang lebih mendasar seperti norma agama, adat istiadat. Social norm menyediakan kontrol

sosial yang efektif. Tidak tertulis tetapi jadi panduan untuk menentukan apa pola perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang ada dalam suatu masyarakat, yaitu perilaku yang dinilai baik di masyarakat

Dari berbagai definisi dan pengertian modal sosial (Putnam, 1993, Fukuyama, 1995, Coleman, 1998, Owyer, 2006, Winter, 2000) terdapat tiga (3) elemen utama modal sosial yaitu social trust, social norm, social network.

Merujuk Rindell (1997) terdapat tiga parameter modal sosial

1. Trust (kepercayaan) (Fukuyama, 1995, Cox, 1995) yaitu harapan yang tumbuh dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh perilaku jujur, teratur, kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Hubungan kerjasama akan positif bila kepercayaan sosial tinggi.
2. Norma, nilai-nilai yang bersumber dari agama, panduan moral, standar seluler. Menurut Putnam (1993) norma merupakan prakondisi dan produk dari kepercayaan sosial, dibangun dan berkembang karena sejarah untuk mendukung iklim kerja sama
3. Jaringan (network) (Putnam, 1993) merupakan jaringan kerjasama antar warga/individu dapat memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang memungkinkan kerjasama, jaringan sosial yang kuat kemudian dapat mengetahui dan bertemu dengan orang lain, membangun interaksi yang kuat bersifat formal maupun informal (Onyx, 1996). Dengan network yang baik akan memperkuat perasaan kerjasama antar warga dan manfaat dari partisipasi.

Hubungan (relasi) antara orang dan orang, orang dan kelompok, organisasi akan menyebabkan terjadi relasi personal, resiprositas (keeratan hubungan timbal balik), pemanfaatan relasi personal.

Tiga bentuk relasi personal:

1. Ikatan ekspresif diantara sesama anggota keluarga, sahabat dekat, dan kelompok-kelompok yang menyenangkan
2. Ikatan Instrumenal yang didasarkan pencapaian sasaran spesifik dan terjadi diantara dua orang yang saling berinteraksi dalam jangka pendek
3. Ikatan campuran diantara yang saling mengenal dan berharap bisa saling berinteraksi dalam jangka panjang.

Menurut Putnam (1993). Coleman (1988), network bisa berbentuk horizontal dan vertikal perilaku masyarakat didalam

dan dianut seluruh pihak yang saling bekerjasama didasari oleh norma dan kepercayaan

Dari parameter modal sosial terdapat indikator kunci modal sosial :

1. Perasaan identitas
2. Perasaan memiliki (aliansi/kebersamaan)
3. Nilai, tujuan (apa yang sudah didapat dari aliansi)
4. Sistem kepercayaan, ideologi (agama, adat istiadat, panduan moral)
5. Sikap-sikap kepada anggota lain (kejujuran, terbuka)
6. Persepsi terhadap akses pelayanan sumber dan fasilitas (seperti kemudahan, pekerjaan, transportasi dll)
7. Opini mengenai kinerja Pemerintah
8. Keyakinan kepada lembaga-lembaga pengentasan kemiskinan, orang-orang yang umumnya dalam kaitan dengan network
9. Tingkat kepercayaan, kepuasan hidup, dan bidang-bidang

2.2.2 Parameter Ekonomi

Kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa beracu pada garis kemiskinan. Konsep kemiskinan yang beracu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Sedangkan kemiskinan yang tidak beracu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan obsolud

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dengan menggabungkan kriteria kemiskinan Biro Pusat Statistik (BPS, 2005) , SUSENAS (2001), BKKBN (2005) mengenai keluarga pra sejahtera.

Tiap orang mempunyai faktor konversi dari ketiadaan sumberdaya dan kesejahteraan yang tidak sama. Sen (1985) menyatakan bahwa semua barang termasuk yang digolongkan barang primer oleh Rawls merupakan input bagi fungsi serangkaian barang-barang –orang yang dilakukan orang-orang dimana keadaan itu dinikmati dan dihargai orang tersebut. Kesetaraan antara orang satu dan lainnya adalah rangkaian barang yang dipilih paling tinggi. Keadilan akan terwujud apabila individu-individu memperoleh kompensasi untuk aspek-aspek keadaan diluar kendali mereka. Untuk itu Sen (1985) mengusulkan suatu distribusi sumberdaya yang memberikan kompesasi ke orang karena berbagai perbedaan bawaan yang tidak dapat diubah.

Roemer (1998), berpendapat bahwa pemerataan menuntut adanya kebijakan kesempatan yang sama yang

didasari bahwa individu mempunyai tanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri. Tetapi selain itu terdapat keadaan diluar kendali mereka yang bisa mempengaruhi seberapa besar kesejahteraan yang dapat mereka capai. Untuk itu diperlukan collection action (tindakan bersama) masyarakat yang bertujuan menyetarakan “keuntungan” antar orang-orang dari kelompok yang keadaannya berbeda-beda tersebut.

Di sisi lain BKKN membuat katagori seseorang termasuk dalam prasejahtera antara lain makan kurang dari dua kali sehari, tidak memiliki pakian yang berbeda untuk bekerja/sekolah dan bepergian, sebagian besar lantai rumah berupa tanah, kurang dari sekali dalam satu minggu makan daging/ikan/telur, atau dalam setahun seluruh anggota keluarga hanya membeli satu stel pakaian baru.

BPS (2006) indikator yang dipakai untuk menentukan keluarga miskin adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang
2. Jenis lantai / bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbai, kayu, berkualitas rendah/ tembok tanpa plester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air air besar/ bersama-sama rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air. Tidak terlindungi/ sungai, air hujan
7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang. Minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu, ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli 1 stel pakaian baru dalam 1 tahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
11. Hanya sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber pendapatan rumah tangga buruh tani, dengan luas lahan 0, 50 hektar, buruh tani, nelayan. Buruh perkebunan, pekerjaan lainnya.

SUSENAS (2006), menggunakan beberapa indikator untuk menentukan suatu keluarga termasuk dalam katagori miskin yaitu:

1. Jumlah anggota keluarga ukuran besar
2. Tingkat pendidikan masyarakat (Kepala Keluarga) rendah, perempuan lebih rendah dari laki-laki
3. Kelahiran masih tradisional atau tidak dihadiri oleh petugas kesehatan
4. Kepala keluarga bekerja di sektor informal
5. Jam kerja singkat
6. Sulit menjangkau fasilitas kesehatan
7. Akses terhadap air minum sulit/ mahal

Dari berbagai indikator kemiskinan dan kesejahteraan, ditentukan 21 parametre kesejahteraan artinya bagi keluarga yang mempunyai ciri 21 indikator penentu dapat dikatakan keluarga tersebut termasuk tidak sejahtera (pra sejahtera). Artinya bahwa keluarga tersebut tidak dapat memenuhi basic need baik untuk barang primer (Basic need) maupun barang sekunder (Human Need).

Piccियो (2000) menyatakan kemiskinan dapat dipengaruhi oleh kehidupan sosial, norma, nilai dan praktek-praktek adat dalam keluarga, masyarakat, juga pasar. Ini mengakibatkan pengecualian perempuan (Gender), kelompok etnis atau ras dan kelompok sosial. Oleh karena itu untuk memberdayakan orang miskin Pemerintah dan Lembaga-lembaga Sosial harus lebih tanggap. Hal ini merupakan kunci keberhasilan untuk mengurangi kemiskinan.

Untuk mengurangi kemiskinan juga diperlukan bentuk organisasi dimana organisasi tersebut dapat menyesuaikan diri untuk mengambil informasi dalam kontek keadaan sosial, budaya dalam kegiatan yang akan dilakukan.

Suatu persektif (pendekatan) untuk memahami masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki masyarakat, dengan cara bagaimana masyarakat yang akan dipelajari didefinisikan tindakan-tindakan sosialnya dan hasil-hasil tindakan tersebut berdasarkan pada pengetahuan serta keyakinan yang mereka punyai. Pengetahuan dan keyakinan yang dipunyai masyarakat tersebut berupa seperangkat konsep, nilai, sistem, kategorisasi, metode dan teori-teori yang digunakan secara selektif oleh para pendukung dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Perwujudan dari kebudayaan tersebut diperantarai atau dapat dilihat dari pranata-pranata sosial yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat (Parsudi Suparlan, 1999, XIII).

Pranata-pranata sosial dan budaya berfungsi untuk memenuhi keperluan khusus (special need) dalam kehidupan

masyarakat. Dua pranata strategis yang dianggap penting untuk memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Bagaimana eksistensi masyarakat Indonesia yang mempunyai beragam Etnis, bermacam tradisi dan wilayah budaya yang berbeda?

Ada wilayah budaya masyarakat etnis jawa, sunda, madura, minangkabau, batak, bali, banjar, bugis, melayu dan lain-lain. Dengan bahasa dan perangkat sistem budaya yang berlainan, masing-masing suku bangsa berupaya menjaga identitas etnis mereka, sehingga dalam jangka waktu panjang eksistensi sebagai suatu masyarakat etnis tetap berlangsung.

Kontjaraningkrat (1993) menggolongkan keberanekaragaman Etnis menjadi tiga (3) yaitu suku bangsa, minoritas, dan golongan masyarakat terasing. Tiap-tiap etnis memiliki tradisi dan sistem budaya yang berbeda yang ditentukan bagaimana cara pandang mereka terhadap alam dan bagaimana mereka menenpatkan diri dalam tatanan alam, Atas dasar cara pandang tersebut, dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Mochtar Naim (dalam Esten, 1999), melihat ada dua (2) pola sistem budaya Indonesia yakni disebut pola J (Jawa), dan Pola M (Minangkabau). Berdasarkan sifatnya pola J (Jawa) yang hierarkhi, paternalistis, dan feodalisme maka keselarasan bagi orang jawa terletak dalam perbedaan tempat/tingkatan seseorang di dalam masyarakat. Masing-masing selalu ada ditempatnya yang melahirkan tradisi berkomunikasi atau berbahasa yang bertingkat-tingkat dalam tradisi tata krama dan lain-lain sebagai perwujudan konsep dan sistem budaya masyarakat etnis jawa

Masyarakat dengan pola M (Minangkabau) keselarasan tidaklah terdapat dalam tingkatan tetapi pada pola hubungan yang terdapat pada eksistensi masing-masing. Pada masyarakat dengan pola minangkabau yang punya ciri antara lain demokratis, fraternalistik, perbedaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial masyarakat, tetapi oleh fungsinya (Navis, 1984)

Dari sekian banyak etnis yang ada di Indonesia tidak dapat disamakan, karena polarisasi terbentuk dalam lingkup yang berbeda, walau dari segi pola tertentu bisa ada kesamaan.

Persinggungan budaya akan berlangsung cepat jika masing-masing etnis mempunyai budaya yang saling terbuka. Namun akan berbeda halnya jika kultur dari etnis tersebut mengisolasi diri. Oleh karena itu budaya Indonesia bisa

diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri secara umum dari hasil persinggungan yang terjadi.

Perwujudan modal sosial tercermin dari ajaran dianut masyarakat, sehingga masyarakat pesisir mempunyai ikatan sosial seperti hubungan kekerabatan yang erat dan kuat. Sikap hidup tradisional masyarakat membawa akibat dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak.

Tonkiss (2000) perhatian terhadap peran modal sosial makin diarahkan pada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang sifatnya lokal termasuk dalam pengurangan kemiskinan, karena hal ini akan lebih mudah untuk dicapai dan biayanya relatif kecil jika modal sosial besar (Narayan, dan Printtchet, 1997, Grootaert dan Van Bastelaer, 2001, Brata, 2004).

Akhir-akhir ini peradaban dan modal sosial cenderung mengalami proses degradasi karena menguatnya semangat individualisme yang berwujud pada pemenuhan kesenangan sesaat (hedonisme).

Untuk itu dalam menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan konsep baru, instrumen dan kemitraan yang sesuai dan implementasi dari bantuan pemerintah.

Selama tiga dekade demokrasi ekonomi (industri) menyebabkan terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam dislokasi sosial karena terjadi erosi nilai-nilai agama masyarakat sekaligus menghasilkan ekspansi ekonomi dan lingkungan (ekologi) yang stres (Fukuyama, 1995). Hasilnya terjadi ketidakstabilan yang menjadi masalah besar. Dengan resiko yang sangat tinggi diperlukan penyesuaian kelembagaan, sosial konsensus, reformasi yang berkesinambungan. Berkait dengan hal ini yang jadi persoalan karena dominannya individualisme dan kurangnya altruisme atau kombinasi keduanya.

Selain itu, apabila pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan jadi masalah untuk pengentasan kemiskinan karena kurang loyalitas bersama dan hirarkhi yang merusak pertumbuhan dan pemerataan.

Sebagian besar negara-negara berkembang memerlukan peningkatan kapasitas di semua sektor publik, swasta dan sukarelawan untuk mengentaskan kemiskinan, meski demikian pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah prasyarat yang substansial dalam mengurangi kemiskinan.

Dari berbagai penyebab kemiskinan di Indonesia ada dua (2) penyebab yang penting diketahui yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain

disebabkan karena sumberdaya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana dan berbagai fasilitas lainnya yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum atau keperluan dasar seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif, dapat tergolong orang yang hidup diatas garis kemiskinan, namun kemampuannya masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin kultural berkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun pihak lain mau membantu (Susanto, 2005)

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Pemerintah menangani program pengentasan kemiskinan secara menyeluruh melalui program-program jaring pengaman sosial (JPS). P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Pekotaan) sebagai program pengentasan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif, masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Senada dengan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, dimana masyarakat miskin merencanakan, memutuskan, menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan program, sehingga keberadaan dan keberhasilan program tergantung tekad dan komitmen masyarakat itu sendiri.

Menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK, 2006) ada beberapa permasalahan kemiskinan yang bisa diidentifikasinya diantaranya adalah kegagalan dalam memenuhi basic need.

Dari berbagai pengertian dan penyebab, kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks, dan tidak dapat dilihat secara angka obsolud. Luas wilayah, beragam budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan

kemiskinan di Indonesia sangat beragam, secara tidak langsung tergambar dari faktor yang dianggap sebagai persepsi dan pendapat masyarakat itu sendiri. Dengan sifat-sifat lokal yang sangat dominan dan pengalaman-pengalaman kemiskinan yang berbeda, kondisi kemiskinan tidak lagi dapat dipahami sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan basic need, perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok dalam menjalani hidup bermartabat.

Upaya Pemerintah Indonesia dengan berbagai program pada dasarnya adalah untuk menyediakan keperluan pangan, layanan kesehatan, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana dan pendampingan dan lain-lain

Menurut UNDP (1997) bahwa orang dikatakan miskin bila tingkat pendapatan berada dibawah garis kemiskinan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah kebanyakan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Sesungguhnya kemiskinan merupakan permasalahan multidemensial, sehingga berbagai upaya penanganan kemiskinan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan.

Agenda pemberdayaan adalah untuk mengurangi kesenjangan dengan memperluas kemampuan manusia secara umum dan orang miskin pada khususnya melalui pendidikan dasar, kesehatan, dan perlindungan sosial karena seringkali orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan ekonomi, sosial, terbatas dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, dan efektivitas dari upaya pembangunan.

Pendekatan Institusional dalam ekonomi salah satu dipelopori oleh Douglass (1990) menghubungkan Institusi untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan. Pendekatan Institusional membedakan institusi, organisasi, dan aktor ekonomi dalam membahas perubahan kelembagaan dalam ekonomi.

Institusi merupakan konteks (landasan) dimana organisasi bekerja menyangkut aturan yang tampak (hukum) dan mengakar (norma). Dalam organisasi para aktor ekonomi berinteraksi dibatasi oleh aturan (hukum) dan norma. Interaksi ketiganya (Institusi, Organisasi, dan aktor ekonomi) akan menentukan kualitas kinerja ekonomi (Douglass, 1990) Kongkritnya dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak hanya mengubah-ubah variabel makro ekonomi. Selain merancang aturan formal yang memadai,

kebijakan Pemerintah harus mempengaruhi aktor ekonomi. Tanpa perbaikan kualitas institusi, kemiskinan sulit ditanggulangi. Kualitas kelembagaan secara nasional akan mempengaruhi kualitas kelembagaan unit-unit organisasi secara individual.

Williamson (2000) membagi klasifikasi kelembagaan dalam lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro berkait dengan aturan dari perilaku manusia, tipu daya, kendala, struktur politik, ekonomi, interaksi sosial, informal, kaidah-kaidah, sangsi-sangsi, larangan, kebiasaan, tradisi, macam perilaku dan aturan-aturan resmi.

Konstitusional, Undang-undang, hak milik menurut Utara (1993) termasuk lingkungan mikro. Dimana pada tingkat mikro berurusan dengan lembaga-lembaga pemerintah, pasar, stok pasar, hirarkhi dari jenis kontraktor, pengelolaan transaksi, untuk melihat kegiatan seperti kegiatan kelembagaan formal lokal, lembaga lokal informal. Lembaga infomal adalah lembaga yang beroperasi diluar lingkungan hukum, fiskal, kerangka peraturan dan kebijaksanaan pemerintah.

Gandhi (1998) membuat survey yang terkait dengan institusi pembangunan pertanian di India. Rumah tangga biasanya ada dalam kelembagaan lokal dan berinteraksi dengan lingkungan secara dinamis dibawah pengaruh struktur sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa lembaga biasanya menguntungkan masyarakat miskin, sedang lembaga yang lain bisa merugikan atau bersifat diskriminatif terhadap masyarakat miskin. Keberhasilan tindakan kolektif masyarakat untuk mendapatkan akses sumberdaya dan memperoleh pendapatan umumnya tergantung tidak hanya dari rumah tangga untuk mendapatkan sumberdaya tersebut, tetapi pada kelembagaan lokal dilingkungannya.

Menurut Ahsan (2001) mengenai peranan kelembagaan dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimana kemiskinan adalah gagasan penting dari sudut pandang kebijakan. Menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin kenaikan pendapatan masyarakat, dan kemungkinan terjadi kenaikan kesenjangan kemiskinan. Oleh karena itu harus ada langkah kongkret kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Setidaknya langkah tersebut menawarkan satu kemungkinan besar dan tidak langsung untuk mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan yang telah dicapai. Selain itu didirikannya transisi ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mengurangi

kemiskinan ternyata tidak cukup, bahkan justru meningkatkan kesenjangan

Elemen kemiskinan non pendapatan disisi lain lebih terbukti dapat langsung dipengaruhi oleh intervensi kebijakan, seperti relasi mikro kredit dan investasi publik atau swasta di bidang kesehatan, sanitasi, matematik, dan keaksaraan. Kekuatan yang melandasi lembaga-lembaga (ekonomi, sosial, dan politik) adalah satu-satunya faktor non pendapatan yang paling mungkin berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan.

Bank Dunia (2000) menyatakan bahwa orang miskin mempunyai penekanan berbeda oleh pembuat kebijakan, tentang hal-hal yang dipersepsikan sebagai dimensi kemiskinan. Selain tingkat pendapatan, konsumsi, pendidikan dan kesehatan, kaum miskin mendapat penekanan pada psikologi seperti percaya diri, ketidak berdayaan, serta pengucilan phisik dan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan orang miskin dengan cara meningkatkan pendapatan, bukan satu-satunya hal yang penting

Sekurang-kurangnya ada enam (6) macam kemiskinan yang perlu dipahami terhadap penanganan kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan subsistem, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal,
2. Kemiskinan perlindungan lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak milik tanah.
3. Kemiskinan pemahaman kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atau informasi yang menyebabkan kesadaran hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan
4. Kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol dalam mengambil keputusan yang menyangkut diri sendiri dan komunitas
5. Kemiskinan identitas, terbatasnya pembauran antara kelompok sosial dan terfragmentasi
6. Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun kelompok.

Pengurangan kemiskinan merupakan agenda nasional maupun Internasional. Melalui lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, dilaksanakan terarah melalui perlindungan sosial yang memberi jaminan pada setiap negara.

Human Capital Development Report (2004) menyatakan perkembangan pembangunan manusia di Indonesia tergantung

pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 1970 an sampai tahun 1990 an, pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Sementara ini pengeluaran Pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan relatif sedikit dibanding Malaysia, Thailand, dan Philipina.

Selama periode krisis capain pembangunan manusia mangalami kemerosotan, juga membawa pengaruh terhadap kemiskinan (Boot, 1999, Iane, 2000). Pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia berpengaruh terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi, memungkinkan penduduk miskin meningkatkan pendidikan dan kesehatan sehingga penduduk miskin dapat meningkatkan nilai assetnya sebagai tenaga kerja

Menurut SUSENAS (2001) profil masyarakat miskin terlihat dalam butir-butir berikut ini:

1. Rumah tangga cenderung memiliki ukuran keluarga besar
2. Tingkat pendidikan masyarakat rendah, proporsi pendidikan terutama perempuan relatif rendah dibanding laki-laki
3. Kelahiran di masyarakat masih tradisional atau tidak dihadiri petugas kesehatan
4. Kepala rumah tangga bekerja di sektor informal dan bekerja di sektor pertanian
5. Jam kerja lebih singkat
6. Memiliki pendidikan dasar atau kurang
7. Tingkat kematian bayi tinggi
8. Akses ke air minum mahal
9. Fasilitas kesehatan kurang

World Bank (2002), Perserikatan Bangsa-bangsa, mencanangkan delapan (8) tujuan Pembangunan Abad Melenium (MDGs) yang harus dicapai oleh 191 anggotanya pada tahun 2015 .

Tujuan tersebut yaitu:

1. Mengurangi proporsi orang-orang miskin (US \$1 perhari) ½ nya antara tahun 1990 sampai tahun 2015
2. Mendaftarkan semua anak-anak di SD sekolah pada tahun 2015 (net tingkat pendidikan dasar)
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (ratio perempuan dan anak laki-laki) di SD dan Sekolah Menengah
4. Mengurangi kematian bayi dan anak jaadi 2/3 antara tahun 1990 sampai 2015 mortalitas dibawah 5 per 1000 kelahiran

5. Mengurangi kematian ibu ratio $\frac{3}{4}$ tahun 1990 sampai tahun 2015 kelahiran di bantu oleh tenaga trampil dan kesehatan
6. Menyediakan akses untuk semua keperluan kesehatan produksi layanan tahun 2015 kontrasepsi tingkat prevaland 2 persen
7. Penerapan Nasional strategi pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015, sehingga tahun 2015 mengurangi berkurangnya sumberdaya lingkungan
8. Membentuk kerja sama global untuk pembangunan.

BAB III.

KESIMPULAN

Investasi Pemerintah disektor publik untuk bidang sosial dan ekonomi mempunyai dua (2) manfaat:

1. Pengeluaran Pemerintah dibidang sosial dimana komponen utamanya adalah pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan, bermanfaat untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi di sektor publik dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan
2. Distribusi pendapatan dan Investasi swasta secara umum ditemukan berpengaruh kuat terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan.

Pentingnya pendekatan ekonomi kelembagaan dalam menganalisa efek dari pembangunan terhadap pengurangan kemiskinan.

Kerangka analisis kelembagaan terhadap pengentasan masalah sosial dan ekonomi di Indonesia diukur dengan dua (2) komponen kelembagaan yaitu (1) modal sosial, (2) pengeluaran pembangunan

1. Komponen modal Sosial diukur dengan sejumlah indikator yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), ketersediaan kredit mikro, suara masyarakat yang tertampung pada isu-isu lembaga publik dan politik. Dalam Komponen modal sosial terkandung didalamnya kerjasama-kerja sama atau kemitraan yang diwakili kelompok komunitas/ masyarakat lokal formal, maupun informal, koperasi-koperasi pedesaan (KUD), asosiasi-asosiasi petani, dan skim-skim yang bersifat menolong diri sendiri
2. Komponen pengeluaran Pemerintah diukur dengan indikator tingkat kesehatan, pendidikan, jumlah dan kondisi infrastruktur fisik.

Tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan dua (2) sumber utama untuk Human Development Indeks (HDI).

Format anggaran Pemerintah Indonesia, pengeluaran sosial mencakup sektor pendidikan dan kebudayaan, sosial, pemuda dan olah raga, agama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibidang kesehatan mencakup sektor tenaga kerja, kependudukan dan keluarga sejahtera serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pernakan wanita, anak dan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hakim Roslan (2000) *“Income Inequality in Malaysia” A Decomposition Analysis By Income Source*. Analisis 7 (1&2), School of Economics, Universiti Utara Malaysia
- ADB (1999), *Fighting Poverty in Asia and Pasific: The Poverty Reduction Strategy of the Asian Development Bank*, Manila, Asian Development Bank
- Ahsan, Syud.M (2001), *Institutional Frame Work and Poverty & Transition Economy Persfctve* CES info Working Paper Series No. 593, Concodtia University
- Akita, Takahiro, dan Rizal A. Lukman (1999), *“ Spatial Pattern of Expenditure Inequality in Indonesia”*, Bulletin of Indonesian Economic Study, 32(2)
- Aktaviani (2003), *Repro ducting Linkinesentative House Hold Model, With House Hold Survey for Poverty Analysis A Compporison of Alternatif Methode Logies*, Journal UNUD
- Aloysius, Gunadi Brata (2005), *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia dan Kemiskinan*, Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Aloysius. Gunadi Brata (2004), *Nilai Ekonomi Modal Sosial, Pada Sektor Informal Perkotaan*, Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Amiel (1998), *“The Subyective Approach to Measurement of Income Inequality “* dalam Silber. J (ed) *Income Inequality Measurement from Theory to Practice*, Devender, Kluwer.
- Andrea .Danielson (2007), *“ Economic Reform and Poverty in Jamaica, Bibbli Ecavinture Clasco, Structure Stability Africa*, Conscuss on Paper 24
- Atkinson, Anthony B (1970) *“ On the Measurement of Inequality”* Journal of Economic Theory 2

- Atkinson, Anthony B (1983), *The Economic of Inequality* 2 nd Edition, Oxford, Clarendon, Press
- Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian Semeru (2001) *Paket Reformasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*, Lemb Penel Smeru, Jakarta.
- Bali Sacan, A.M, EM Pernia, A.Asra (2003). *Revisiding Growth And Poverty Reduction What Do Subnational Data Show* ; Burenn of Indosian Economic Studies 39(3), 329-351
- Benerjee, Ahbijit dan Estrher Duflo (2003).” *Inequality and Growth: What Can the Data Say?*” Journal of Economic Growth 8(3):267-99
- Ben-Porath, E,I. Gilboa dan D. Schmeidler (1997), “ *On the Meauserement of Inequality Under Uncertainty*”, Journal of Economic Theory, 75.
- Blakelley, Rojer, dan Diana Suggate (1997), “*Publik Pulicy Development*”, Dalam Djuid Pobnisonled, Social Capital and Policy Development, Willington; Tastituse of Policy Studies, hal 80-100.
- Boot, Anne (1998), *The Indonesian Economi y on In Nineteeeeth and Twentieth Centuries*, London, MacMillan.
- Booth, Anne (2000), *Poverty and Inequality in the Soeharto Era, An Assessment*, Bulletin Indonesian Economy Studies, 36 (1)
- BPS (2006), *Berita Resmi Statistik 102 47 / IX / BPS*. Jakarta.
- BPS (2006), *Laporan Triwulan*, Biro Pusat Statistik, Jakarta
- BPS (2007). *Beberapa Indikator Utama Sosial- Ekonomi Indonesia*, Biro Pusat Statistik, Jakarta
- BPS, BAPPENAS , UNDP (2004). *Indonesian Human Development Report* , Biro Psat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan , United Nation, Development Programme
- BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2001), *Menuju Consensus Baru, Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*, Laporan Pembangunan Manusia, Biro Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan dan United Nation, Development Programme.

- Bringman, Peter Pasglyn Davis (2004) *The Australias Pony Handbool, Crows, Nese* : Allen And Unwins
- Chamber, Robert (1997), *Whose Reality Cowts ? Putting The Firs Last*, Intermediate Tehnology Publication London.
- CIDES, (2007) “ *Mengatasi Kemiskinan di Indonesia* “, Center for Information and Development Studies.
- Coyx, E (1991), *Back gruondmase, al and Boys Lecture* ([http / www.lesa.eduan / coxp.htm](http://www.lesa.eduan/coxp.htm))
- Colleman, J (1988)” *Social Capital in the Creation of Human Capital*” American Journal of Sociology 94, (supllement) S95-S120. Dalam the World bank, 1998 hal 5-7
- Colleman, David, dan Frd Nixson (1994), *Economics of Change in Less Development Countries*, Harvester-Wheatsheaf, New York, dkk.
- Cooper and Schinler P.S., 2008, *Business Research Method*, Mc Graw-Hill International Edition: Singapore
- Dahlan, M. Alwi (1993), *Menjabarkan Kualitas dan Martabat manusia dan Masyarakat* . Hal 3-12. Dalam: Sofyan Effendi et.al (eds) 1993. *Membangun martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Gajah Mada University Press Cet 2, Yogyakarta*.
- Daly, Anne dan George Fane (2000), “ *Antypoverty Program in Indonesia*, “ Bulletin of Indonesian Economic Studies, 36 (2)
- Deininger, K, dan L. Squire (1995 b) “ *Inequality and Growth, Result from “ New Data Base*, (memeo). Washington D.C, World Bank
- Deverajan S, Swroop V, dan Zou H.R (1996) “ *The Composition of Public and Economic Growth*” Journal of Monetary Economics, 37
- Dollar.D dan A. Kraay (2000) “ *Growth in Good for Poor, Development Rearsch Group*” Woeking Paper, Washington. D. C. The World Bank

- Field, G dan George Jakubson (1993) “ *New Evident On Kuznets Curve*” (mimeo), Ithaca.N.Y. Cornell University
- Fukuyama, Francis (1995), *Trust; The Social Virtves and The Creation of Prosperity*, New York; The Free Press.
- Gandhi, Vasan.P, (2003) “ *Rural Household Income Strategi Poverty Allevition and Interaction with the Local Institutional Environment*”. A. Study on Age Consereg.
- Grootear,C, (1997).” *Social Capital : The Missing Link*” in *Expanding The Measure of Wealth: Indicators of Envirommentally, Sustainable Development Studies and Monograohs Series No.7*. Washington. DC: The World Bank, (dalam the World Bank. 1998. Hal 5-7
- Hair, J.F Jr Andersonn, R.E, Tathan, R.L and Balck, WC, (2000), *Multivariate Analysiis U.S.A*: Prectiice Hall International Inc
- Indrawati, Sri Mulyani (2005) *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006* Kementrian Komisi Bidang Kesra, Jakarta.
- Kakwani, N. (2001) “ *Pro Poor Growth and Policies*” Asian Development Review. 18 (2)
- Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat, (2006)” *General Guidance and Work Groups of Poverty Reduction Coordination*” Team (Pedoman Umum, Ban Kelompok Kerja Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jakarta.
- Kemal. A.R (2003) “ *Institutional Change Growth and Poverty Level in Pakistan*”, The Pakistan Development Review (42) 4
- Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), (2005) *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SN PK)*, Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Jakarta.
- Koentjoroningrat, (1993). *Masyarakat Terasing di Indonesia, Kebudayaan Jawa. Gramedia*, Jakarta
- Koentjoroningrat, (1993), *Pola Kerjasama Antar Etnis Cina dan Jawa*, Studi ITB Central, Jakarta,

- Krueger.A.O, H.B. Lary,T. Monson, dan Akrasanee (ed) (1981) “*America Academy of Political and Social Science 409.*”
- Lanjauw, P.M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow (2001), “*Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*” World Bank Working Paper No,2739
- Muchtar (2004) “*Strategi Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal dalam Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan*” Kasus Implementasi P2KP di desa Sukadanau, Laporan Penelitian Puslit, PKS, Balatbangsos.
- Navis, A.A (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabaum*, Grafiti Pers, Jakarta
- Narayan, D dan L. Pritchett . (1997), “*Cent and Sociability: House Hold Income and Social Capital in Rural Tanzania*” Working Paper, Woshington: World Bank.
- Partha Dasgupta & Ismail Serageldin, (1999) eds (2000).” *Social Capital A Multifaceted Perspektive*; Washington, D.C, World Bank (Buku Prenew Except PP 217, 401, 403 – 25).
- Permana.C.E (2001), *Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jabad Baduy, Wedatama*, Wydia Sastra, Jakarta
- Piccioto.R (2000), “*Poverty Reduction and Institutional Change International Approaches to Development*”, Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relation
- Pikketty. Thomas (2006). “*The Kuznets Curves Yesterday and Tommorrow. Journal Unstanding Poverty, Vol 1.*”
- Putnam, R. (1995). *The Prosperous Community, Social Capital and Public Life*, “*American Prospect (13): 34-42* (dalam the World bank. 1998 hal 5-7)
- Ramirez, A.G. Ranis dan F. Steward (1998) “*Economic Growth and Human Capital*” QEH Working Paper, No.18
- Ravallion, M. Dan Gaurau Datt (1996) “*How Important to India s Poor is The Sectoral*” World Bank Economic Review, 10.

- Rawls, John (1999). *A. Theory of Justice* Cambridge .MA: Harvard University Press.
- Roemer. John (1998). *Equity of Opportunity* Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rusman, RD (1995) “Bowling Alone : America’s Bezlining Social Capital”, *DI, Journal of Democracy*, Vol 6 No 1 hal. 65-78.
- Saez. Emmanuel (2006), “ *Redistribution to World Low Incomes in Richer Countries Journal, Unstanding Poverty. Vol 1* ”
- Sen, Amartya, K (1976) “ *Poverty An Ordinal Approach to Meauserement*” *Econometrica* 44 (2).
- Sen, Amartya (1985). “*Commodities and Capability*” Amsterdam: Nort-Holland
- Sen, Amartya. (2000), “ *Social Justice and The Distribution of Income.*” Dalam Anthony.B. Atkinson and Francois Bourguigson, (Edition), *Hand-Book, Of Income Diatributin*, Amsterdam Nort Holland.
- Sekaran, V., (2003), *Research Method For Business, A Skill Building Approach*, Fourth Edition, John Willy and Sons. Inc: NJ
- Serageldin,I. And Grootart, (1997). “ *Defining Social Capital; Integrating View.*”Paper presented at Operations Evaluation Department Conferece on Evaluation and Development: The Institutional Dimension, Washington, DC: The World Bank.
- Smeru (2006) “ *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Partisipasi (AKP)*, Lembaga Penelitian Smeru.
- Spellenberg, Anse (1997) “*Towards a Framework for The Meusevement Of Social Capital*” Dalam David Robinson (Ed). *Social Capital dan Policy Development*, Wellny tow The Instituteof Policys Studies hal. 42-52.
- Squire, Lyn (1993) “ *Fighting Poverty*” *American Economic Review*, 83 Mdy.

- Suharno, Susilowati, I., Anggoro, S., dan Gunanto, E.Y.A. 2018. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan, Unsoed Press, Purwokerto.
- Suharno, Anwar, N., & Saraswati, E. (2019, March). A technique of assessing the status of sustainability of resources. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 250, No. 1, p. 012080). IOP Publishing.
- Suharto, Edi (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Suharto, Edi (2002), *Globalisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, LSP-STKS, Bandung.
- Tambunan, Tulus (2006) "Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis" Pustaka Quatum, Jakarta.
- Taylor, Alan dan Jeffrey Williamson (1994), "*Convergence In the Age of Mass Migration*: EREH.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (2005), *Kemiskinan di Indonesia Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir*, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- Timmer C.P (2004) "The Road to Pro-Pooz Growth. The Indonesian Experience in Regional Perspektive " *Buletin of Indonesian Economic Studies* 40 (2) 177-207.
- Tonkiss, Ferdinand, (2000)," *Trustm Social Capital and Economy*," Dalam F. Tonkiss dan A Pasey (eds.). *Trust and Civil Society*. St. Martins, New York:
- UNIDO (2000b), "Human Development Report 2000", New York: Oxford University Press.
- Williamson, Jeffrey S (1996) "Globalization, Conier Gence, And History" *The Journal of Economic History*, 56 (2).
- Williamson, Jeffrey.G (1996) " Regional Inequality and the Process of national. A Discription of the Pattern, Economic Development and Culture Change XIII (4).

- Wodon, (1999), "Growth, Poverty and Inequality, A Regional Panel For Bangladesh". Policy Research Working Paper, No 2072 March Washington D.C. The World Bank.
- World Bank (2001), World Development Report 2000/2001. Attracting Poverty Overview, Washington, D.C. : The World Bank
- World Bank, (1990b), Indonesia: Poverty Assessment and Strategy Report, report No. 8034-IND, Washington, D.C. World Bank (2000b), World Development Indicators 2000, Washington, D.C.: The World Bank.
- The World Bank.(1998), " The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved For Funding." Social Capital; Initiative Working Paper No.2. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Social Sustainable Development Network.
- The World Bank (2006). Kesetaraan dan Pembangunan, Laporan Pembangunan Dunia. Penerbit Salemba, Jakarta.
- Van Bastelaer, T. (2000). " Does Social Capital Facilitate the Poor's Access to Credit". A Review on the Micro-economic Literature." Social capital Initiative Working paper No.8

DAFTAR INDEKS

A

attitude, 25

B

bruto, 11

E

elastisitas, 11, 12

etnis, 4, 21, 22, 23, 35, 42, 43, 50, 58,
63, 64

G

gender, 5, 16, 54, 70

H

HDI, 5, 34, 35, 73

I

institutional, 25, 26, 31, 45, 51, 59, 74,
77, 78, 79

IPM, 5, 27, 54

K

kelembagaan, 26, 56, 78

M

modal fisik, 5, 24, 25

modal sosial, 5, 6, 7, 18, 21, 23, 24, 25,
30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58,
59, 60, 61, 65, 73

multidimensi, 58

multidimensial, 5

N

netto, 11

P

partisipasi, 5, 6, 7, 16, 21, 25, 30, 32,

39, 40, 41, 43, 50, 54, 56, 60, 66, 69

pengelolaan, 58

poverty, 12, 15, 18, 42

R

rules, 6, 48

T

trust, 6, 7, 24, 25, 42, 44, 46, 47, 48, 50,
52, 59, 60